

5. ANALISA DAN PEMBAHASAN

1.1 Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender

Masalah kesetaraan dan keadilan gender tidak dapat dipisahkan dari momentum perjuangan hak-hak azasi manusia PBB tahun 1948. Pada saat itu hak-hak azasi manusia hanya ditekankan pada pentingnya perlindungan terhadap hak-hak individu setiap warga negara dalam hidup berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Titik perhatian tahap pertama lebih kepada hak-hak politik, yang selanjutnya sesuai perkembangan zaman meliputi hak-hak sosial, ekonomi dan budaya seseorang. Pelaksanaan hak-hak azasi manusia inilah yang kemudian memberikan inspirasi bagi kaum perempuan untuk memperjuangkan hak-hak reproduksinya, sebagai suatu proses aktualisasi diri kaum perempuan dalam mengatasi kepincangan dan ketidakadilan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan.

Dalam tahap selanjutnya, kesetaraan gender dipahami sebagai suatu kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, seperti kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan keamanan nasional serta menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama dan memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-haknya dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya kepada pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kesetaraan gender merupakan penilaian yang sama yang diberikan masyarakat atas kesamaan dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, dan atas berbagai peran yang mereka lakukan. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan, baik terhadap laki-laki maupun perempuan (www.menegpp.go.id).

Sementara itu, keadilan gender dipahami sebagai suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marjinalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Agar proses yang adil bagi

perempuan dan laki-laki dapat terwujud, diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan berbagai hal yang secara sosial dan menurut sejarah telah menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari peran yang dimainkannya. Keadilan gender adalah pengantar menuju pada kesetaraan gender. Keadilan gender tidak berfokus pada perlakuan yang sama tetapi lebih mementingkan pada kesetaraan sebagai hasilnya. Konsep keadilan gender mengenali bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan-kebutuhan, kekuasaan yang berbeda, dan bahwa perbedaan-perbedaan ini harus diidentifikasi dan diatasi agar kesetaraan antar kedua jenis kelamin dapat terwujud (www.menegpp.go.id).

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.

1.2 Kesetaraan Gender: Harapan Kaum Perempuan

Dengan adanya pengertian kesetaraan dan keadilan gender tersebut, maka tentunya perempuan pun memiliki harapan tersendiri atas penerapan dan aplikasi kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Dari berbagai studi literatur, berikut ini adalah penjabaran harapan kaum perempuan atas penerapan kesetaraan gender.

Dalam bidang politik, perempuan menghendaki adanya pengakuan peran dan posisinya dalam pengambilan keputusan politik. Politik dipahami sebagai usaha untuk mengatur kehidupan. Berbagai keputusan politik yang diambil oleh negara akan sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan, sampai ke hal-hal yang paling kecil sekalipun. Semua kejadian dalam kehidupan masyarakat adalah hasil dari keputusan politik. Perempuan sebagai manusia, seperti halnya laki-laki

yang juga adalah bagian dari masyarakat, mempunyai hak untuk menentukan apa yang harus dilakukan dalam upaya mengatur kehidupannya (Murniati, 2004, p.118). Perempuan juga mempunyai hak untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya, sudah sewajarnya apabila perempuan diikutsertakan dalam usaha memproduksi keputusan politik yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, kesetaraan gender dalam kehidupan politik berbicara tentang terciptanya suatu kehidupan politik dimana peran dan posisi perempuan sama dengan laki-laki. Peran serta perempuan dalam pengambilan keputusan politik tidak diabaikan. Perempuan tidak dipinggirkan, melainkan diperhitungkan suaranya.

Dalam bidang hukum, tentunya perempuan menghendaki adanya hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama dengan laki-laki. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah dengan adanya penerapan konsisten dari undang-undang yang mampu melindungi perempuan dari kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis dan spiritual. Tentu saja dalam hal ini pemerintah memegang peranan yang sangat penting karena pemerintahlah yang berwenang untuk merancang, mengesahkan, melaksanakan serta mengawasi penerapan undang-undang tersebut. Berbicara tentang hukum pasti tidak jauh dari politik. Untuk mewujudkan kesamaan hak dan perlindungan hukum antara laki-laki dengan perempuan, maka posisi pengambil keputusan politik dalam parlemen perlu diratakan kepada kaum perempuan. Perempuan perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk duduk di pemerintahan dan membuat keputusan politik. Perempuan yang menduduki posisi pengambil keputusan politik diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk perubahan struktur sosial menjadi situasi yang lebih adil.

Dalam bidang ekonomi, perempuan menghendaki adanya kesamaan kesempatan untuk berpartisipasi mendukung perekonomian rakyat, tidak hanya dalam sektor domestik, melainkan juga dalam sektor publik (Murniati, 2004, p.169). Tugas perempuan dalam memelihara kehidupan sangat erat kaitannya dengan perekonomian, karena kehidupan ekonomi merupakan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan pokok. Oleh karena itu, tugas domestik yang diberikan kepada perempuan sangat sarat akan kehidupan perekonomian. Namun

tidak hanya berhenti sampai di situ saja, perempuan juga menuntut kesempatan untuk berkiprah dalam sektor publik. Mereka juga ingin berperan dan mendapatkan bagian dalam pembangunan negara serta menikmati pemerataan hasil pembangunan tersebut. Dalam dunia karier pun perempuan menghendaki kesetaraan gender tetap ditegakkan, misalnya keadilan dalam hal pemberian upah, kesamaan peluang untuk meraih prestasi karier dan tidak adanya diskriminasi seksual dalam tempat kerja (Vuuren, 1993, p.80).

Dalam bidang sosial budaya, perempuan menghendaki adanya posisi yang sama dengan laki-laki di mata masyarakat. Tidak dapat disangkal bahwa budaya patriarki memang sangat dominan dan berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, namun kendati demikian perempuan tetap harus dihargai sebagaimana selayaknya manusia yang sama-sama mempunyai pikiran dan kemampuan dengan laki-laki, meskipun tidak persis dan arena memang tidak persis. Dalam hal ini, kesetaraan gender dalam kehidupan sosial budaya berbicara tentang terciptanya suatu kehidupan sosial yang menghargai perempuan apa adanya, dengan berbagai kekurangan dan kelebihanannya. Perempuan tidak ingin hanya tampil sebagai pelaku kegiatan domestik, tetapi juga sebagai pelaku kegiatan publik yang mana biasa dilakukan oleh laki-laki (Atmazaki, 2003, p.38). Perempuan tidak menghendaki dalam masyarakat terjadi diskriminasi gender, eksploitasi dan tindakan kekerasan terhadap perempuan - apapun wujudnya.

Dalam bidang pendidikan, perempuan menghendaki adanya kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Peran perempuan dalam pembangunan sangat penting dan pendidikan adalah suatu modal yang sangat penting bagi perempuan untuk dapat berkiprah dalam pembangunan bangsa. Pada awalnya, setiap pemimpin besar negara pasti menerima pendidikan pertama kali dari keluarga, dimana peran ibu sangat besar dalam mendidik anak. Semakin baik tingkat pendidikan ibu, semakin baik pula mereka mengasuh dan membimbing anak-anaknya (Rahardjo, 2005, p.84). Melihat peran perempuan yang sangat besar dalam memberikan pendidikan primer bagi para calon pemimpin bangsa, maka sudah sepatutnya jika perempuan dibekali dengan berbagai pengetahuan. Selain itu, tingkat pendidikan yang tinggi pada perempuan juga memungkinkan bagi perempuan untuk tidak diremehkan dalam masyarakat.

Dalam hal keamanan nasional, keikutsertaan perempuan dalam pertahanan keamanan sebenarnya telah berakar dalam tradisi perjuangan bangsa. Di era pembangunan ini, perempuan masih menghendaki adanya kesamaan kesempatan, hak dan kewajiban untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertahanan dan keamanan (Tjokrowinoto, 1988, p.103).

1.3 Ksetaraan Gender dalam Realitas

Seperti kata pepatah ‘Tak ada gading yang tak retak’, demikian pula harapan kaum perempuan akan kesetaraan gender tidak sepenuhnya dapat terwujud dengan sempurna dan lancar-lancar saja. Berbagai halangan merintangi perwujudan konsep kesetaraan gender di sekitar kehidupan perempuan.

Dalam sektor politik, prosentase perempuan yang duduk di parlemen tidak sebanding dengan prosentase laki-laki. Hasil Pemilu tahun 1999 yang menyertakan 57% pemilih perempuan hanya terwakili 8,8% dari seluruh anggota DPR, lebih rendah dari hasil pemilu 1997 yang berjumlah 11,2% dari jumlah pemilih 51%. Pada Pemilu 2004 perempuan hanya terwakili 11%. Jumlah perempuan yang menjabat sebagai Hakim Agung dan Hakim Yustisial Non Struktural di Mahkamah Agung juga menunjukkan penurunan dari 36 pada tahun 1998 menjadi 34 pada tahun 1999, dan 28 pada tahun 2002. Pada tahun 1999 jumlah PNS perempuan adalah 36,9%, laki-laki sebesar 63,1% dari jumlah seluruh PNS (4.005.861), dan dari jumlah tersebut hanya 15,2% PNS perempuan menduduki jabatan struktural, sedangkan PNS laki-laki sebesar 84,8%. Sedangkan tahun 2000 terjadi sedikit perubahan dimana jumlah PNS perempuan adalah 37,6%, laki-laki sebesar 62,4% dari jumlah seluruh PNS (3.927.146), dan dari jumlah tersebut hanya 15,7% yang menduduki jabatan struktural, sedangkan PNS laki-laki sebesar 84,3% (www.menegpp.go.id).

Dalam bidang hukum, perempuan seringkali masih menjadi korban kekerasan fisik dari laki-laki. Peraturan perundang-undangan juga masih berpihak pada salah satu jenis kelamin, dengan kata lain belum mencerminkan kesetaraan gender. Dalam bidang hukum masih banyak dijumpai substansi, struktur, dan budaya hukum yang diskriminatif gender. Jumlah peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan berjumlah kurang lebih 32 buah. Tidak

hanya itu saja, dalam hal penanganan perdagangan perempuan, Indonesia justru mendapat stempel dunia internasional sebagai salah satu negara terburuk dalam menangani perdagangan perempuan. Betapa tidak, jumlah perempuan dan anak yang diperdagangkan diperkirakan mencapai 700 ribu hingga satu juta orang per tahun (www.menegpp.go.id).

Di bidang ekonomi, secara umum partisipasi perempuan masih rendah, kemampuan perempuan memperoleh peluang kerja dan berusaha masih rendah, demikian juga dengan akses terhadap sumber daya ekonomi. Padahal Penduduk wanita yang jumlahnya 49.9% (102.847.415) dari total (206.264.595) penduduk Indonesia (Sensus Penduduk 2000) merupakan sumber daya pembangunan yang cukup besar. Partisipasi aktif wanita dalam setiap proses pembangunan akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Kurang berperannya kaum perempuan, akan memperlambat proses pembangunan atau bahkan perempuan dapat menjadi beban pembangunan itu sendiri. Rendahnya partisipasi perempuan dan kemampuan perempuan memperoleh peluang kerja dan berusaha ditunjukkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu 45% (2002) sedangkan laki-laki 75,34%. Sedangkan di tahun 2003 TPAK laki-laki lebih besar dibanding TPAK perempuan yakni 76,12% berbanding 44,81%. (www.menegpp.go.id). Kurang aktifnya peran perempuan dalam pembangunan disebabkan karena kondisi dan posisi yang kurang menguntungkan dibanding laki-laki. Seperti peluang dan kesempatan yang terbatas dalam mengakses dan mengontrol sumberdaya pembangunan, sistem upah yang merugikan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah, sehingga manfaat pembangunan kurang diterima kaum perempuan. Berbagai upaya pembangunan nasional yang selama ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik perempuan maupun laki-laki, ternyata belum dapat memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Bahkan belum cukup efektif memperkecil kesenjangan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak perempuan memperoleh manfaat secara optimal belum terpenuhi sehingga pembangunan nasional belum mencapai hasil yang optimal, karena masih belum memanfaatkan kapasitas sumber daya manusia secara penuh.

Dalam kehidupan sosial budaya, tata nilai sosial budaya patriarki yang dianut masyarakat menyebabkan berbagai kesenjangan gender terhadap kaum perempuan. Dalam masyarakat, nilai patriarki dipahami sebagai kekuasaan laki-laki, hubungan kuasa dengan apa laki-laki menguasai perempuan, dan untuk menyebut sistem yang membuat perempuan tetap dikuasai melalui bermacam-macam cara (Bhasin, 1996, p.1). Manifestasi pengendalian patriarki tergambar dalam hal pembagian kerja berdasarkan gender yang sangat timpang, lebih disukainya anak laki-laki dalam keluarga daripada anak perempuan, usikan seksual di tempat kerja, kontrol laki-laki atas tubuh perempuan dan seksualitasnya, rendahnya hak perempuan atas harta dan warisan, kekerasan terhadap perempuan sampai dengan pencitraan negatif dalam media massa. Saat ini, hampir semua institusi sosial, baik lembaga negara, hukum, pendidikan, agama, norma-norma, media massa, keluarga, maupun militer, memakai nilai-nilai patriarki. Dengan kenyataan tersebut, perempuan akan selalu mengalami diskriminasi gender di seputar kehidupannya.

Di bidang pendidikan, kaum perempuan masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Kondisi ini antara lain disebabkan adanya pandangan dalam masyarakat yang mengutamakan dan mendahulukan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan daripada perempuan. Ketertinggalan perempuan dalam bidang pendidikan tercermin dari presentase perempuan buta huruf (14,54% tahun 2001) lebih besar dibandingkan laki-laki (6,87%), dengan kecenderungan meningkat selama tahun 1999-2000. Tetapi pada tahun 2002 terjadi penurunan angka buta huruf yang cukup signifikan. Namun angka buta huruf perempuan tetap lebih besar dari laki-laki, khususnya perempuan kepala rumah tangga. Angka buta huruf perempuan pada kelompok 10 tahun ke atas secara nasional (2002) sebesar 9,29% dengan komposisi laki-laki 5,85% dan perempuan 12,69%. Menurut Statistik Kesejahteraan Rakyat 2003. Angka buta huruf perempuan 12,28% sedangkan laki-laki 5,84% (www.menegpp.go.id).

Dalam hal keamanan nasional, kehadiran perempuan dalam korps wanita baik dalam TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU serta Polisi Negara hanyalah merupakan konsekuensi logis dari amanat UUD 1945 dan bukanlah merupakan

substitusi dari tugas-tugas yang dipikul anggota-anggota Angkatan Bersenjata laki-laki (Tjokrowinoto, 1988, p.103).

1.4 Radio Kosmonita: Radio dengan Target Audience Perempuan yang Berperspektif Gender

Dari penjabaran konsep kesetaraan gender dan harapan kaum perempuan serta realita atas penerapan kesetaraan gender di atas, maka diperlukan penerapan kesetaraan gender yang benar (sesuai dengan konsepnya) dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk media massa harus berperspektif gender dalam menyebarluaskan pemberitaannya.

Radio Kosmonita, sebagai radio dengan target *audience* perempuan wajib mendukung perwujudan konsep kesetaraan gender melalui program-program siarannya. Menurut Nur Imam Subono, jurnalisme berperspektif gender dapat diartikan sebagai kegiatan atau praktik jurnalistik yang selalu menginformasikan atau bahkan mempermasalahkan dan menggugat secara terus-menerus, baik dalam media cetak (seperti dalam majalah, surat kabar, dan tabloid) maupun media elektronik (seperti dalam televisi dan radio) adanya hubungan yang tidak setara atau ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan (Subono, 2003, p.59).

Ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan oleh para pelaku media massa dalam mewujudkan jurnalisme yang berperspektif gender (Siregar, 2002, p.219):

1. Media massa yang berperspektif gender adalah media massa yang mampu mengangkat permasalahan perempuan pada arus utama (*mainstream*). Penumbuhan rasa empati terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan merupakan salah satu jalan bagi media untuk bertindak *fair*, proporsional serta berimbang dalam memberitakan kasus-kasus yang melibatkan perempuan.
2. Media massa yang berperspektif gender adalah media massa yang mampu menjalankan peran sebagai *watchdog* bagi kekuasaan dan tidak terjerumus menjadi pelestari kekuasaan, sehingga perempuan tidak lagi menjadi korban dari aroganisme pelanggaran kekuasaan.

3. Media massa yang berperspektif gender adalah media massa yang mampu meningkatkan jumlah praktisi perempuan serta menempatkan perempuan tidak lagi sebagai objek namun berperan aktif sebagai subjek.
4. Media massa yang berperspektif gender adalah media massa yang mampu melakukan perubahan paradigma, berkaitan dengan pencitraan perempuan yang selama ini dipakai. Pencitraan perempuan dalam media, yang selama ini cenderung seksis, objek iklan, objek pelecehan dan ratu dalam ruang publik, perlu diperluas wacananya menjadi perempuan yang mampu menjadi subjek dan mampu menjalankan peran-peran publik dalam ruang publik.

Dalam penelitian ini akan dilihat, apakah Radio Kosmonita sebagai media massa yang berperspektif gender, telah menggambarkan keempat prinsip dasar tersebut ke dalam program siaran LIPSTIK.

1.5 Konsep Kesetaraan Gender dalam Program LIPSTIK

Perwujudan konsep kesetaraan gender dalam Program LIPSTIK ini diteliti melalui transkrip 4 program siaran LIPSTIK dengan topik “Problem Diskriminasi Gender Kaum Perempuan di Papua”, “Poligami dalam Konteks Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”, “*Trafficking* dan Anak yang Dilacurkan” dan “Kekerasan Seksual pada Anak-Anak Perempuan” dengan menggunakan metode analisis wacana Teun A. Van Dijk. Van Dijk melihat suatu wacana terdiri atas 3 struktur/tingkatan yang masing-masing bagian saling mendukung. Tiga struktur/tingkatan itu antara lain: struktur makro, superstruktur dan struktur mikro (Bungin, 2003, p.162), yang meliputi: tema, alur, latar, detil, ilustrasi, maksud, pengandaian, penalaran, kata kunci (*keywords*), pemilihan kata, ekspresi dan metafora. Dari hasil analisis wacana, peneliti menemukan bahwa Radio Kosmonita mendukung perwujudan konsep kesetaraan gender dalam program LIPSTIK, antara lain dalam wujud:

1.5.1 Radio Kosmonita: Ruang Publik (*Public Sphere*) bagi Perempuan

Konsep mengenai *public sphere* dipicu pertama kali oleh tulisan Jürgen Habermas yang berjudul *The Public Sphere* pada tahun 1962. Dalam esai tersebut,

Habermas mengatakan tentang adanya sebuah wilayah sosial yang terbuka, bebas dari sensor dan dominasi. Wilayah ini bisa diartikan sebagai ruang di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap segala kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul, serta menyiarkan segala bentuk pemikiran dengan cara-cara yang etis, yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Wilayah itu disebutnya sebagai '*public sphere*', yaitu semua wilayah yang memungkinkan kehidupan sosial manusia membentuk opini publik yang relatif bebas. Orang-orang yang terlibat di dalam percakapan *public sphere* adalah orang-orang privat, bukan orang dengan kepentingan bisnis atau profesional, bukan pejabat atau politikus, yang memiliki kebebasan dalam menyatakan pendapatnya. Ruang publik pada prinsipnya terlepas dari campur tangan negara, ataupun dari berbagai kekuatan yang bersifat koersif (Paskarina, 2006). Ruang publik adalah ruang kehidupan. Ruang dimana tidak adanya dominasi. Ruang kebebasan berekspresi di antara sesama manusia. "Kebebasan" ini dimaksudkan agar ruang publik dapat memainkan peran sebagai arena berlangsungnya diskusi yang terbuka antar warga negara.

Habermas menawarkan konsep ruang publik dimana setiap unsur dalam masyarakat mampu hadir dengan terbuka terhadap permasalahan, jujur terhadap kepentingan bersama, dan berbicara tentang kebaikan yang universal. Ruang publik semacam ini mensyaratkan adanya keterbukaan tiap-tiap unsur untuk menerima kebenaran yang berada di luar dirinya. Merumuskan sebuah kebenaran dan keadilan transenden. Menurut Habermas, hanya pada ruang publik yang bebaslah para individu bisa berada dalam kedudukan setara, sehingga dapat melakukan transaksi wacana dan praksis politik tanpa diselimuti rasa takut dan tanpa distorsi (Ibrahim, 1998, p.xlv). Ruang publik adalah suatu hal yang penting, mengingat fungsinya sebagai tempat bertemu dan bertabrakannya berbagai opini. Seperti diungkapkan Donny Gahral Adian, berbagai individu dapat mengajukan beragam opini subyektif tentang berbagai urusan. Namun, mereka hanya bisa menyusun opini yang representatif dengan memasuki ruang publik. Konteks di mana setiap orang bisa menipiskan kepentingan diri atau kelompoknya. Ruang publik ini perlu karena dalam ruang publik ini setiap orang didorong untuk

memperluas perspektifnya dengan mengapresiasi sudut pandang lain tentang berbagai persoalan (Adian, 2002, p.5).

Saat ini, ruang publik pada masyarakat modern telah digantikan fungsinya oleh media massa. Media massa memiliki peran sentral di dalam penyebaran informasi serta debat publik bagi masyarakat luas. Untuk itu, radio sebagai salah satu media massa yang memiliki pengaruh kuat, seharusnya berperan konkrit dalam proses penciptaan ruang publik, khususnya bagi perempuan.

Dalam kaitannya dengan dunia perempuan dan media, kita melihat konstruksi dan sosialisasi ideologi gender yang menempatkan kaum pria pada posisi dominan masih sangat kuat dan kentara di Indonesia (Ibrahim, 1998, p.xlvix). Media-media yang mengklaim dirinya sebagai media dengan segmen perempuan ternyata justru memiliki andil yang besar dalam memperkuat stereotip gender yang ada di masyarakat. Media-media itu -termasuk radio dengan target *audience* perempuan- belum mampu menjadi *agent of change* atau pendorong perempuan untuk melakukan sebuah gebrakan baru dalam upaya reposisi perannya di masyarakat. Akhirnya, betapapun perjuangan perempuan untuk mempolitikasi ruang privat untuk diangkat ke ruang publik, upaya itu tetap masih berada di bawah kecenderungan dominan kandungan media yang pada dasarnya hanya memindahkan “ruang privat” (persoalan dapur, kamar dan lain-lain) untuk dipertontonkan ke dunia publik. Sehingga, media sebenarnya, seperti apa yang dikatakan Ann Ferguson dalam karyanya *Sexual Democracy*, hanya memindahkan ‘*family-based patriarchy*’ ke ‘*public patriarchy*’ (Ibrahim, 1998, p.xliii). Dari sini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya ruang publik dalam media massa -termasuk radio- belum dapat memberikan kesamaan kesempatan bagi kaum perempuan untuk dapat menyuarakan pemikirannya.

Dalam program LIPSTIK, Radio Kosmonita berusaha menyediakan dirinya sebagai ruang publik (*public sphere*) bagi perempuan. Radio Kosmonita memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menyuarakan penderitaannya akibat praktik diskriminasi gender, menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah yang seringkali bias gender dan atas penerapan budaya patriarki dalam masyarakat yang telah banyak membawa kerugian bagi kaum perempuan. Ruang publik yang disediakan oleh Radio Kosmonita bukan hanya memindahkan “ruang

privat” (persoalan dapur, kamar dan lain-lain) untuk dipertontonkan ke dunia publik, melainkan mampu mengangkat pemikiran-pemikiran kaum perempuan untuk menjadi perhatian masyarakat luas.

5.5.1.1 Radio Kosmonita dan Jeritan Hati Kaum Perempuan

Sebagai radio dengan target *audience* perempuan yang memiliki fungsi ruang publik (*public sphere*) bagi perempuan, Radio Kosmonita melalui program LIPSTIK menyediakan ruang bagi perempuan untuk mengungkapkan isi hatinya atas berbagai ketidakadilan gender yang selama ini banyak dialami perempuan. Ketidakadilan gender tersebut digambarkan dalam bentuk pelimpahan beban kerja domestik lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), subordinasi terhadap perempuan (anggapan tidak penting dalam pengambilan keputusan), kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual serta pembentukan stereotip negatif terhadap perempuan yang juga turut menjadi penyebab praktik diskriminasi gender lainnya (Fakih, 2003, p.12-21, p.71-75).

Pelimpahan beban kerja domestik lebih panjang dan lebih banyak (*burden*) terhadap perempuan, jelas tergambar dalam program LIPSTIK edisi 20 Oktober 2005 dengan topik ‘Problem Diskriminasi Gender Kaum Perempuan di Papua’. Nara sumber yang diundang, Astrid Wiratna (seorang psikolog dan aktivis perempuan) menceritakan dengan detil bagaimana kaum perempuan Papua menanggung beban kerja domestik yang sangat berat, sementara kaum laki-laki Papua hanya berdiam diri, melihat dan tidak juga melakukan satu usahapun untuk meringankan beban tersebut.

Astrid Wiratna: “Secara tradisional, peran yang dibakukan dalam masyarakat Papua, laki-laki punya tugas untuk melindungi anak dan istri. Mereka punya perlengkapan perang, dan itu akan dipakai untuk melindungi rumah dari musuh. Perlindungannya sifatnya fisik. Nah, perempuan itu yang punya tanggung jawab untuk mengurus makan, obat dan memelihara seluruh rumah. Pendidikan anak-anak juga termasuk. Jadi perempuan ini mengurus bagaimana supaya makanan terhidang di rumah dan bagaimana anak-anak bisa tumbuh sehat. Kalau denger begitu, ah itu kan biasa. Tapi musti dilihat di konteksnya. Makanan orang asli Papua itu tidak ada di pasar, tapi ada di hutan. Yang pergi ke hutan untuk cari ubi, sagu, obat itu tugasnya perempuan. Obatnya orang Papua asli bukan obat-obat kayak di apotik, kan daun-daunan dan sebagainya. Dan juga jika di pantai, mereka makan ikan, nah yang cari ikan itu perempuan. Orang Papua belum punya pasar seperti orang Jawa. Makan itu dicari di hutan. Jadi mereka cari ubi, sagu, obat-

obatan, babi dan ikan, itu tugas mereka. Jadi yang keluar rumah untuk cari makan itu perempuan.”

Astrid Wiratna: “Jadi sekarang mbak bisa bayangkan begini, saya pernah lihat sendiri tapi nggak motret, kalau jalan berdua – laki sama perempuan, yang laki tuh tinggi besar, dia cuman jalan dengan pakaian penduduk asli, membawa panah di tangannya. Di sebelahnya, perempuan bisa bawa lima noken (nama tas Papua yang terbuat dari anyaman). Lima digantung di kepalanya. Satu noken isinya babi, satu noken isinya bayi, satu noken isinya kayu bakar, dua noken isinya sayur, ada ubi, singkong, pokoknya makanan-makanan gitu. Yang satu untuk makanan mereka, yang satu untuk dijual di pasar.”

Sumber: Transkrip program LIPSTIK “Problem Diskriminasi Gender Kaum Perempuan di Papua”, edisi 20 Oktober 2005, Lampiran 1.

Tidak hanya berhenti sampai di situ, pelimpahan beban kerja domestik yang berlebihan terhadap perempuan Papua juga tergambar pada finansial keluarga. Perempuan Papua tidak dinafkahi oleh suaminya meskipun mereka hidup dalam budaya yang primitif dan segalanya serba terbatas. Mereka harus mengusahakan bagaimana agar makanan dapat selalu terhidang di meja dan seluruh kebutuhan rumah tangga terpenuhi, tanpa bantuan nafkah dari suami, bahkan ketika suami -selaku kepala keluarga- mendapatkan bantuan dana dari *Free Port* pun, istri tetap tidak mendapatkan bagian barang sepeser pun.

Astrid Wiratna: “Free port ini ngasih dana 1%. Itu komitmen mereka untuk memajukan masyarakat Papua terutama suku Amume sama Komoro. Setiap keuntungan mereka satu tahun mereka akan berikan 1% untuk perkembangan masyarakat Papua. Nah itu dibagi rata. Dibagi rata di suku-suku yang tanahnya dipakai untuk free port, terutama Amume, Komoro. Nah, tentu saja dibagi rata ke kepala rumah tangga. Kepala suku juga kan laki-laki kebanyakan, kepala rumah tangga laki-laki. Maka dipakailah untuk cewek dan beli alkohol.”

Penyiar: “Dan istrinya nggak dikasih?”

Astrid Wiratna: “Nggak dikasih, tetep harus cari makan di hutan.”

Penyiar: “Waduh sampai segitunya ya?”

Astrid Wiratna: “Nah kalau dimajuin sedikit, artinya masyarakatnya sudah maju, tidak lagi di hutan, itu pindah ke rumah tangga mbak. Jadi misalnya di lingkungan free port, di lingkungan staff itu mereka tidak lagi mencari ubi di hutannya, tetapi mereka makan beras, makan seperti orang-orang Jawa pada umumnya. Yang terjadi, uang 1% itu tetep dibawa oleh suami dan suami nggak mau tahu dari mana istri bisa dapat uang untuk beli beras, gula, jadi hanya pindah tempat bahwa sekarang belinya gula, beras dan sudah nggak ke hutan lagi. Tapi tetep urusan domestik adalah urusan istrinya. Dan uang itu tetep nggak turun sama istrinya.”

Astrid Wiratna: “Nah kemudian ada lagi yang mungkin karena perempuan-perempuan Papua juga nggak pernah terlatih manage uang, laki-laki Papua pakai alasan begini: Kalau dikasih sama istri hari ini, langsung habis hari ini, toh istri juga nggak bisa belanja.”

Sumber: Transkrip program LIPSTIK “Problem Diskriminasi Gender Kaum Perempuan di Papua”, edisi 20 Oktober 2005, Lampiran 1.

Dari kutipan percakapan di atas, secara analisa semantik dapat dilihat bahwa Radio Kosmonita hendak menggambarkan beratnya pelimpahan beban kerja domestik berlebihan yang dihadapi oleh perempuan Papua. Perempuan dengan kondisi fisik yang tidak lebih kuat dari laki-laki malah diharuskan menanggung beban kerja domestik yang lebih berat daripada laki-laki. Dengan menyuarakan hal tersebut Radio Kosmonita berusaha membuka mata masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender bagi kaum perempuan. Dalam hal ini, kesetaraan gender adalah dengan tidak membebankan seluruh beban kerja domestik kepada perempuan.

Subordinasi (anggapan tidak penting dalam pengambilan keputusan) terhadap perempuan juga diungkapkan dalam program LIPSTIK edisi 20 Oktober 2005 dengan topik ‘Problem Diskriminasi Gender Kaum Perempuan di Papua’. Nara sumber, Astrid Wiratna mendeskripsikan dengan jelas bagaimana kaum perempuan diabaikan dalam hal pengambilan keputusan penting, seperti keputusan penjualan tanah adat dan pendidikan anak, padahal pengambilan keputusan tersebut sangat berkaitan erat dengan kehidupan perempuan Papua dalam menjalankan perannya di sektor domestik.

Astrid Wiratna: “Ngambil keputusan, laki-laki lho mbak. Jadi yang boleh menentukan ini atau itu, misalnya katakan sederhana, anak sekolah atau tidak sekolah, itu laki-laki. Mereka punya tanah adat, nah tanah adat itu diturunkan dari nenek moyang. Yang menentukan tanah ini boleh dijual atau nggak itu laki-laki. Sementara yang nanem ubi untuk makan itu perempuan. Nah kita bisa lihat, dalam kemajuan zaman, kemudian banyak perusahaan datang, tanah adat ini kan dijual ke perusahaan-perusahaan itu, nah harusnya kan perempuan yang nanem di situ untuk makan keluarga kan diajak ngomong donk.”

Penyiar: “Iya bener, untuk memutuskan ya.”

Astrid Wiratna: “Iya, nggak diajak ngomong.”

Penyiar: “Tapi ternyata nggak?”

Astrid Wiratna: “Nggak.”

Penyiar: “wah, wah.”

Astrid Wiratna: “Jadi dijual saja. Makanya yang terjadi, dia harus cari di hutan lain karena tanah dia udah nggak ada. Jalannya kan jadi semakin jauh. Jadi sekarang mbak bisa bayangkan begini, saya pernah lihat sendiri tapi nggak motret, kalau jalan berdua – laki sama perempuan, yang laki tuh tinggi besar, dia cuman jalan dengan pakaian penduduk asli, membawa panah di tangannya. Di sebelahnya, perempuan bisa bawa lima noken (nama tas Papua yang dibikin dari anyaman). Lima

digantung di kepalanya. Satu noken isinya babi, satu noken isinya bayi, satu noken isinya kayu bakar, dua noken isinya sayur, ada ubi, singkong, pokoknya makanan-makanan gitu. Yang satu untuk makanan mereka, yang satu untuk dijual di pasar.”

Sumber: Transkrip program LIPSTIK “Problem Diskriminasi Gender Kaum Perempuan di Papua”, edisi 20 Oktober 2005, Lampiran 1.

Dari penuturan di atas, secara analisa semantik dan retorik dapat dilihat bahwa Radio Kosmonita hendak menggambarkan suatu kondisi dimana perempuan diabaikan dalam pengambilan keputusan penting. Salah satunya adalah masalah penjualan tanah adat yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan perempuan Papua yang sehari-harinya harus bercocok tanam di tanah itu. Perempuan Papua tidak diajak bermusyawarah dalam penjualan tanah tersebut, padahal itu menyangkut kelancaran kerja perempuan Papua di sektor domestik. Pada akhirnya, dengan diabaikannya perempuan, maka perempuan jugalah yang harus menanggung akibat dari pengambilan keputusan tersebut. Perempuan Papua harus berjalan jauh ke hutan untuk mencari makanan, tanpa bantuan yang bersifat fisik dari suami. Dengan menyuarakan ketidakadilan tersebut Radio Kosmonita berusaha menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender bagi kaum perempuan. Dalam hal ini, kesetaraan gender adalah dengan tidak mengabaikan perempuan dalam pengambilan keputusan penting.

Manifestasi diskriminasi gender dalam berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis maupun kekerasan seksual juga disuarakan dalam program LIPSTIK. Salah satunya dalam program LIPSTIK edisi 20 Oktober 2005 dengan topik ‘Problem Diskriminasi Gender Kaum Perempuan di Papua’. Astrid Wiratna kembali menuturkan dengan jelas bagaimana perempuan Papua menjalani kehidupan yang berat dan harus ditambah lagi dengan kekerasan fisik akibat suami yang mabuk alkohol dan juga kekerasan psikis karena suami menjalani kehidupan *free sex*. Tidak hanya itu saja, pukulan juga harus diterima perempuan Papua, ketika mereka gagal menjalankan perannya dalam mendidik anak. Padahal masalah keberhasilan anak dalam pendidikan tidak lepas dari pemenuhan gizi, yang terkait dengan kesejahteraan ekonomi keluarga, dimana suami sama sekali tidak memberikan sumbangsuhnya sama sekali.

Astrid Wiratna: "Pertambangan itu dunia kasar, dunia laki-laki, dan di seluruh dunia dunia pertambangan itu dua, alkohol sama cewek. Nah cowok-cowok Papua yang pengangguran tadi juga bergaul kan sama cowok-cowok pertambangan, maka mereka pun doyan alkohol dan doyan cewek. Seks bebas lah dan alkohol. Nah lalu kemudian itu berdampak apa? Ditularkanlah pada istrinya dari segi penyakit. Dari segi perilaku karena mereka mabuk, mungkin mereka punya keinginan yang tidak langsung terpuaskan, langsung tumbuhlah kekerasan terhadap perempuan. Nah jadi, perempuan itu sudah segala beban di atas kepala mereka, termasuk anak yang harus dibesarkan, ditambah kekerasan yang karena laki-laki yang doyan alkohol. Nah nggak tahu gimana ceritanya, akhirnya alkohol dan seks ini menjadi ciri bagi kehidupan laki-laki di Papua. Nah jadi sulit banget ya mbak membayangkan sebuah dunia dimana perempuan seolah-olah bertanggung jawab terhadap semua sisi kehidupan di rumah dan laki-lakinya cuma mabuk dan main cewek."

Penyiar: "Kalau boleh dibilang, sebenarnya di sana itu perempuannya tahu nggak kalau suaminya free sex?"

Astrid Wiratna: "Tahu."

Penyiar: "Tapi nggak bisa berbuat apa-apa ya?"

Astrid Wiratna: "Ya, ya itulah laki-laki."

Penyiar: "Itulah laki-laki, cuma bisa bilang seperti itu aja."

Astrid Wiratna: "Lalu kalau (anak) mereka jadi bandel, nilai mereka jadi jelek, orang tua dipanggil ke sekolah, yang terjadi anak itu dipukuli. Bikin malu keluarga. Lalu ayah akan mukulin ibu."

Sumber: Transkrip program LIPSTIK "Problem Diskriminasi Gender Kaum Perempuan di Papua", edisi 20 Oktober 2005, Lampiran 1.

Dari dialog di atas, secara skematik dapat dilihat bahwa Radio Kosmonita hendak menggambarkan kekerasan-kekerasan yang dihadapi oleh perempuan Papua. Secara psikis, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa suami mereka terikat dengan kebiasaan mabuk dan *free sex*. Kedua hal tersebut tentunya sudah merupakan suatu beban psikologis tersendiri bagi perempuan. Namun tidak hanya itu saja, pukulan juga harus diterima perempuan Papua akibat kebiasaan mabuk atau bahkan ketika mereka gagal menjalankan perannya dalam mendidik anak.

Kekerasan psikis yang dialami perempuan juga tergambar dalam program LIPSTIK edisi 27 Oktober 2005 dengan topik 'Poligami dalam Konteks Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak'. Pada edisi ini, Endang Lukitasari, salah seorang korban poligami menuturkan penderitaan psikis yang dirasakannya sebagai seorang istri yang cintanya dikhianati oleh suaminya. Penderitaan psikis yang dialami Endang dalam praktik poligami dimulai sejak sang suami mengutarakan keputusannya untuk berpoligami, sampai pada ulah suaminya yang

bersikap tidak jujur dan terus terang terhadap Endang, mengabaikan ungkapan sakit hati Endang, perubahan sikap dan tingkah laku suami, dan penggugatan cerai dari suami dengan alasan yang dibuat-buat.

- Penyiar: “Mbak Endang, Anda sebagai istri yang kemudian diduakan oleh suami, itu ceritanya gimana, mbak Endang tahu nggak kalo suaminya mau menikah lagi?”
- Endang: “Awalnya belum tahu. Trus akhirnya lama-lama dia juga cerita. Waktu itu saya nolak. Trus suami memberikan pengertian, yang akhirnya pada saat itu pikiran saya mencoba untuk menerima. Akhirnya saya diperkenalkan sama ceweknya.”
- Penyiar: “Kemudian setelah dikenalkan itu apa yang dirasakan mbak Endang?”
- Endang: “Ya gimana ya, sakit hati.”
- Penyiar: “Sakit hati ya.”
- Endang: “Pada saat itu masih pendekatan. Aku kan minta baik-baik untuk dia itu ngerti posisi aku, gitu kan, ternyata mereka bilang udah pisah, ternyata tetep jalan aja. Akhirnya mereka memutuskan untuk nikah siri.”
- Penyiar: “Ok, apa yang dijadikan alasan oleh suami mbak Endang waktu itu, kalau dia mau menikah lagi?”
- Endang: “Alasannya, katanya dia seneng aja sama perempuan itu, yang ternyata pacar lamanya.”
- Penyiar: “Terus ada nggak perubahan-perubahan sikap dari suami ketika dia mau mengutarakan bahwa dia mau menikah lagi?”
- Endang: “Banyak sih. Misalnya jarang di rumah, sering diem kalo di rumah, sibuk sendiri, kalo ditanya nggak merespon. Wajahnya sedih. Aku jadi curiga, kenapa?”
- Penyiar: “Waktu itu yang mengugat cerai akhirnya siapa?”
- Endang: “Akhirnya yang menggugat cerai itu suami.”
- Penyiar: “Suami justru ya yang menggugat cerai. Apa alasan suami yang dituliskan di situ untuk menggugat cerai mbak Endang?”
- Endang: “Alasannya pertama karena katanya saya sering marah-marah tanpa sebab. Ke dua karena terlalu cemburu.”
- Penyiar: “Menurut mbak Endang bener nggak alasan yang disebutkan di situ?”
- Endang: “Amat sangat tidak benar. Aku pikir kenapa nggak langsung aja bilang kalau dia itu ingin menikah lagi?”
- Penyiar: “Ok, terus apa yang kemudian dilakukan mbak Endang ketika tahu bahwa alasan yang dipakai untuk bercerai adalah alasan yang dibuat-buat?”
- Endang: “Aku menolak tentunya.”

Sumber: Transkrip program LIPSTIK “Poligami dalam Konteks Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”, edisi 27 Oktober 2005, Lampiran 2.

Lebih lanjut, akibat ulah suaminya, guncangan psikologis dialami oleh Endang. Perempuan ini mengalami kekecewaan yang mendalam dan hatinya tidak bisa menerima keputusan suaminya untuk mendua, namun Endang tidak punya kuasa lagi untuk menghalang-halangi keputusan suaminya itu. Bahkan sampai se usai perceraian pun Endang mengalami kekecewaan dan trauma dengan laki-laki.

Penyiar: “Ok, terus apa yang kemudian dilakukan mbak Endang ketika tahu bahwa alasan yang dipakai untuk bercerai adalah alasan yang dibuat-buat?”

Endang: “Aku menolak tentunya. Pada waktu itu aku pinginnya berontak tapi nggak ngerti caranya.”

Penyiar: “Mbak Endang setelah perceraian, apa sempat ada trauma dengan yang namanya laki-laki?”

Endang: “Pada saat itu sempet benci, jengkel, terus kepikiran untuk nggak mau nikah.

Sumber: Transkrip program LIPSTIK “Poligami dalam Konteks Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”, edisi 27 Oktober 2005, Lampiran 2.

Kekerasan terhadap perempuan dalam poligami seperti yang dialami oleh Endang ini juga dibenarkan oleh nara sumber yang dihadirkan, Tanti Supriatsih yang juga adalah seorang pengacara dari Savy Amira, *Women Crisis Center* Surabaya. Bahkan, Tanti menuturkan bahwa dalam poligami tidak hanya penderitaan psikis yang dialami perempuan, melainkan sampai pada level kekerasan fisik, ekonomi, dan seksual. Tanti Supriatsih juga menegaskan bahwa dalam praktik poligami, tidak ada keadilan sama sekali bagi perempuan, bahkan perempuan dan anak-anak sangat dirugikan.

Penyiar: “Nah sebenarnya tentang keadilan ini diatur nggak mbak dalam UU?”

Tanti Supriatsih: “Mengenai keadilan juga di atur dalam UU perkawinan juga kompilasi hukum Islam. Tetapi menurut pemahaman saya adil dalam poligami itu tidak ada, baik secara materi atau psikis ya. Dalam hal psikis juga saya rasa keadilan bagi perempuan itu bohong, omong kosong kalau menurut saya.”

Penyiar: “Jadi sebenarnya kalau dalam hal seperti ini kekerasan apa yang dialami perempuan, mbak Tanti?”

Tanti Supriatsih: “Seluruhnya, jadi psikis, fisik, ekonomi, dan seksual. Itu rentan terjadi.”

Penyiar: “Mbak Tanti pihak mana yang dirugikan dan diuntungkan dalam praktik poligami ini?”

Tanti Supriatsih: “Yang jelas pihak yang dirugikan pasti perempuan dan anak-anak. Kalau yang diuntungkan, mungkin ya dari si suami.”

Penyiar: “Kenapa bisa gitu?”

Tanti Supriatsih: “Ya gimana ya, kan dia bisa punya istri lebih dari satu orang kemudian ibarat seperti barang saja bisa ganti-ganti. Kalau saya memandang seperti itu. Tapi alangkah lebih bijaksana kalau kita bicara dari sisi perempuan, bahwa itu sangat merugikan dan menyakiti hati perempuan. Saya pikir tidak ada satu perempuan pun yang mau diduakan. Jadi perempuan dan anak-anak adalah pihak yang dirugikan dengan poligami.”

Sumber: Transkrip program LIPSTIK “Poligami dalam Konteks Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”, edisi 27 Oktober 2005, Lampiran 2.

Berbagai macam kekerasan terhadap kaum perempuan juga disuarakan dalam program LIPSTIK edisi 15 Februari 2006 dengan topik ‘*Trafficking* dan Anak yang Dilacurkan’. Pada edisi ini, nara sumber yang diundang, Farahita dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), menceritakan dengan detil bagaimana kaum perempuan mengalami berbagai macam kekerasan dalam praktik perdagangan manusia (*Trafficking*), mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual.

Penyiar: “Sebenarnya, apa sih yang disebut trafficking itu sendiri mbak?”

Farahita: “Konsep yang berkembang selama ini tentang trafficking kita anggap sebagai perdagangan manusia. Jadi yang diartikan sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman dan kekerasan dan bertujuan untuk eksploitasi. Ada prosesnya, jadi kalau misalnya kita lihat bagaimana manusia ini kemudian dipindahkan oleh manusia juga tentunya pelakunya, kemudian akan ditampung di sebuah tempat dan diterima juga oleh manusia. Tapi yang menjadi pemikirannya atau garis besarnya dalam proses itu terjadi ancaman, selain ancaman juga ada kekerasan yang menyertainya, juga ini bertujuan untuk eksploitasi.”

Sumber: Transkrip program LIPSTIK “*Trafficking* dan Anak-anak yang Dilacurkan”, edisi 15 Februari 2006, Lampiran 3.

Tidak hanya perempuan dewasa, anak-anak dengan jenis kelamin perempuan pun seringkali mendapat perlakuan diskriminasi gender. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang nara sumber yang hadirkan dalam program LIPSTIK edisi 15 Februari 2006. Yoris dari *Hotline*, LSM AIDS, menuturkan bagaimana anak-anak perempuan mengalami kekerasan dalam praktik pelacuran anak-anak, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Dalam praktik ini, anak-anak perempuan dari desa dibujuk, dirayu dan dibuat tertarik dengan iming-iming gaji besar dan pekerjaan di perusahaan besar, namun akhirnya mereka hanya dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK).

Penyiar: “Itu tadi yang disebut AYLA ya mas Yoris.... AYLA sendiri itu sebenarnya apa sih pengertiannya?”

Yoris: “Sebenarnya itu pekerja seks sekarang ini banyak sekali, sekarang menjadi trend anak kecil itu menjadi tujuan dari para om-om. Jadi AYLA itu singkatan dari Anak Yang diLacurkan. Biasanya para calo atau para traficker mencari anak-anak itu di desa dengan cara dibujuk rayu, memberi iming-iming dengan gaji besar, nanti mau dipekerjakan di perusahaan yang wah, sehingga orang-orang akan tertarik. Atau mereka pacari anak itu lalu mereka buat seakan-akan benar-benar mencintai, ternyata setelah sampai di suatu tempat baru mereka masukan secara perlahan-lahan. Sehingga anak-anak menjadi sangat

tergantung pada mereka. Dan mereka selalu membuat anak-anak itu tidak bisa berdaya, misalnya uangnya diambil semua, dipaksa supaya punya hutang, itu yang sering terjadi. Dan biasanya dikirim ke beberapa daerah di Indonesia. Dan Jawa Timur termasuk sending area.”

Sumber: Transkrip program LIPSTIK “*Trafficking dan Anak-anak yang Dilacurkan*”, edisi 15 Februari 2006, Lampiran 3.

Tidak hanya dalam ranah publik, praktik kekerasan seksual terhadap anak-anak perempuan juga mereka alami pada ranah privat. Hal ini tergambar secara skematik dari penuturan Umi dan Ana, selaku nara sumber yang dihadirkan dari Savy Amira, *Women Crisis Center* Surabaya, dalam program LIPSTIK edisi 28 Juli 2005, dengan topik ‘Kekerasan Seksual pada Anak-anak Perempuan’. Pada edisi ini, Umi menuturkan bagaimana anak-anak perempuan mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan keluarga mereka, seperti tetangga, orang-orang yang dianggap selama ini dekat atau bahkan guru sekolah sekalipun. Bahkan tidak sedikit pula kekerasan seksual dalam bentuk *incest*, yang mana dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan darah, seperti paman, kakak atau bahkan ayah dari anak perempuan itu sendiri.

Penyiar: “Mbak Umi boleh tahu nggak, belakangan ini di Savy Amira kasus yang banyak masuk tentang kekerasan seksual pada anak perempuan, bagaimana?”

Umi: “Ya, untuk 6 bulan terakhir ada 13 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dan 4 di antaranya adalah terhadap anak. Anak-anak di sini berusia 18 tahun ke bawah.”

Penyiar: “Bentuknya apa aja mbak?”

Umi: “Kalau kekerasan pada anak itu, incest, jadi hubungan sedarah yang dilakukan oleh keluarga, kemudian ada juga pencabulan oleh orang lain tapi masih dekat dengan keluarga, seperti tetangga, orang yang dianggap selama ini dekat, gurunya. Untuk 2 kasus yang sedang kami tangani, yang satu oleh ayah kandung sedang yang satu lagi.....”

Penyiar: “Sudah berapa lama incest itu dilakukan oleh ayahnya?”

Umi: “Sudah lama, sudah puluhan tahun, dari dia kecil sampai dia dewasa. Sebenarnya banyak kasus incest yang dilakukan oleh ayah yang usianya sudah dewasa. Jadi ketahuannya pada saat dia sudah dewasa. Jadi kita kategorikan kekerasan seks pada perempuan, bukan anak-anak lagi.”

Ana: “Anak-anak itu diposisikan sebagai orang atau individu yang harus menurut orang tua, harus menurut orang dewasa. Nah, itu kemudian mematikan sikap asertif anak untuk menolak. Demikian juga kalau ada serangan seksual atas tubuhnya, dia kemudian tidak berani untuk melakukan penolakan.”

Sumber: Transkrip program LIPSTIK “*Kekerasan Seksual pada Anak-anak Perempuan*”, edisi 28 Juli 2005, Lampiran 4.

Dari kutipan percakapan di atas, secara skematik dapat dilihat bahwa Radio Kosmonita hendak menggiring alur *talk show* pada penggambaran kekerasan seksual yang rawan dialami anak-anak perempuan. Dari penggambaran kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak perempuan di atas, dapat dilihat bahwa selain mengalami kekerasan seksual, anak-anak juga mengalami kekerasan psikis. Mereka merasa tidak lagi memiliki rasa aman dan perlindungan, karena yang melakukan kekerasan terhadap mereka justru malah anggota keluarga mereka sendiri.

Dengan menyuarakan berbagai macam kekerasan yang dialami kaum perempuan Radio Kosmonita berusaha memberitahu masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender bagi kaum perempuan. Dalam hal ini, kesetaraan gender adalah dengan tidak melakukan kekerasan terhadap kaum perempuan, apapun bentuknya.

Ketidakadilan gender dalam bentuk pembentukan stereotip negatif terhadap perempuan juga digambarkan dalam program LIPSTIK edisi 15 Februari 2006. Stereotip negatif terhadap perempuan ini, pada akhirnya turut menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan lainnya. Pada edisi ini, Farahita menuturkan bahwa latar belakang dari terjadinya perdagangan perempuan, tidak lepas dari stereotip negatif perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Perempuan dikenal identik dengan kelemahan dan ketidakberdayaannya. Perempuan juga banyak diposisikan dalam kelompok yang lemah, tidak berdaya dan bisa menjadi korban. Oleh karena stereotip negatif itulah, kemudian oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, perempuan dibuat menjadi tidak berdaya dan akhirnya bisa menjadi sebuah kelompok yang dieksploitasi.

Penyiar: "Trus kenapa sampai terjadi trafficking ini sendiri mbak Farah?"

Farahita: "Iya, mungkin kalau kita melihat ya mbak ya...sekarang ini memang yang menjadi korban dari trafficking sebagian besar adalah perempuan dan anak. Karena memang posisi perempuan dan anak ini sangat rentan ya? Dan banyak faktor yang orang melihat bahwa perempuan dan anak ini menjadi kelompok yang tidak berdaya. Penyebabnya ini sangat beragam mbak, jadi misalnya sekarang ini mungkin orang-orang banyak pikir ya... kenapa sih kemudian ada orang yang kemudian direkrut orang untuk kemudian bekerja di salah satunya misalnya ya.. pelacuran atau prostitusi? Memang alasan strukturalnya adalah masalah kemiskinan, kalau kita lihat, memang banyak ya...kondisinya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau melihat lagi ada 3 hal yang ikut menyertainya. Yang pertama persoalan kemiskinan, ada juga persoalan seksualitas perempuan, jadi pemahaman yang sampai sekarang

sampai di masyarakat bahwa keperawanan menjadi hal yang paling utama, jadi ketika perempuan ini tidak perawan kemudian yang terjadi adalah dia menjadi tidak bisa masuk ke perannya.”

Penyiar: “Apakah itu juga disebabkan karena ini mbak, biasanya perempuan identik dengan lemah, itu bisa jadi salah satunya?”

Farahita: “Itu jadi salah satu penyebabnya, makanya kemudian dibuat oleh kelompok lain menjadi tidak berdaya dan kemudian akhirnya bisa menjadi sebuah kelompok yang dieksploitasi itu tadi. Pandangan masyarakat yang sampai sekarang ini melihat perempuan hanya sebagai obyek. Baik itu obyek seks, atau kemudian obyek lain karena ketidakberdayaan itu. Menjadikan mereka korban kekerasan.”

Sumber: Transkrip program LIPSTIK “*Trafficking dan Anak-anak yang Dilacurkan*”, edisi 15 Februari 2006, Lampiran 3.

Dari kutipan siaran di atas, secara analisa semantik dan skematik, tampak bahwa Radio Kosmonita hendak menggiring alur *talk show* pada penyuaran ketidakadilan gender dalam bentuk pembentukan stereotip negatif terhadap perempuan. Perempuan seringkali digambarkan sebagai kelompok masyarakat yang lemah, tidak berdaya dan bisa menjadi korban. Akibat dari stereotip negatif tersebut, terjadi diskriminasi serta berbagai bentuk ketidakadilan lain, yang salah satunya adalah perdagangan kaum perempuan. Dengan menyuarakan ketidakadilan tersebut, Radio Kosmonita berusaha membuka mata pendengarnya bahwa bagi kaum perempuan kesetaraan gender itu sangat penting untuk diwujudkan. Dalam hal ini, kesetaraan gender adalah dengan tidak memberikan stereotip-stereotip negatif bagi perempuan, sehingga berbagai bentuk ketidakadilan lain pun tidak muncul bagi perempuan.

Dari berbagai penggambaran penderitaan perempuan atas manifestasi praktik diskriminasi gender, Radio Kosmonita berusaha menjadi media massa yang berperspektif gender. Radio Kosmonita mengangkat permasalahan perempuan pada arus utama (*mainstream*) dengan cara menumbuhkan rasa empati pendengarnya terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan (Siregar, 2002, p.219). Dari penggambaran di atas, tampak juga bahwa ruang publik yang disediakan oleh Radio Kosmonita bukan hanya memindahkan “ruang privat” (persoalan dapur, kamar dan lain-lain) untuk dipertontonkan ke dunia publik, melainkan mampu mengangkat pemikiran-pemikiran kaum perempuan untuk menjadi perhatian masyarakat luas.

Namun satu hal yang perlu untuk diperhatikan adalah pentingnya bagi Radio Kosmonita untuk juga memberi ruang bagi suara dari pihak laki-laki, yang mana banyak digambarkan sebagai pelaku tindak ketidakadilan gender terhadap kaum perempuan. Dalam program-program siaran LIPSTIK yang diteliti dalam penelitian ini, pihak laki-laki tidak tampak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Hal ini tampak dari tidak banyaknya nara sumber laki-laki yang dihadirkan. Program siaran LIPSTIK yang diklaim sebagai ruang publik bagi perempuan hendaknya juga mewujudkan kesamaan kesempatan untuk berpendapat, termasuk juga bagi pihak laki-laki. Hal ini bukan untuk membenarkan tindak ketidakadilan gender terhadap kaum perempuan, namun paling tidak dengan memberi ruang bagi laki-laki, pandangan laki-laki terhadap permasalahan yang diangkat dapat diketahui dan wawasan perempuan dapat diperluas. Hal ini tentunya sangat penting sekali dalam upaya pembentukan ruang publik yang demokratis bagi perempuan. Dengan terwujudnya ruang publik yang demokratis bagi perempuan, maka perempuan tidak hanya memandang berbagai permasalahan dari satu sisi saja, melainkan dapat memperluasawasannya dari berbagai sisi.

5.5.1.2 Radio Kosmonita Kritis terhadap Pemerintah

Sebagai Radio dengan target *audience* perempuan yang memiliki fungsi ruang publik (*public sphere*) bagi perempuan, Radio Kosmonita menyediakan ruang bagi perempuan untuk menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah yang seringkali bias gender (lebih mengutamakan salah satu jenis kelamin daripada jenis kelamin lainnya). Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip dasar perwujudan media massa yang berperspektif gender, dimana media massa harus mampu menjalankan peran sebagai *watchdog* bagi kekuasaan dan tidak terjerumus menjadi pelestari kekuasaan, sehingga perempuan tidak lagi menjadi korban dari aroganisme pelanggaran kekuasaan (Siregar, 2002, p.219). Hal serupa juga dituturkan Dr. Rainer Adam, bahwa fungsi media - termasuk radio - berlipat ganda. Mereka melaporkan fakta dan memberi informasi, mendidik publik, memberi komentar, menyampaikan dan membentuk opini. Lebih jauh lagi, media

mengkritik, mengatur dan mengontrol pemerintah (termasuk polisi dan militer) serta semua orang yang beraksi dalam lingkup publik (Rainer, 2000, p.8).

Dalam program LIPSTIK, kritik terhadap kinerja pemerintah tidak disampaikan secara langsung dan tegas, melainkan secara implisit. Kritikan terhadap pemerintah disampaikan melalui penuturan akibat-akibat yang ditanggung perempuan akibat kinerja pemerintah yang bias gender. Misalnya saja, pada LIPSTIK edisi 27 Oktober 2005 dengan topik ‘Poligami dalam Konteks Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak’. Pada edisi ini, kinerja pemerintah yang dikritik adalah masalah pemenuhan hak-hak istri dan anak dalam gugatan perceraian yang seringkali dikesampingkan.

Tanti Supriatish: “Dalam kaitannya dengan poligami, biasanya berujung pada gugatan perceraian sepihak, bila ternyata si istri tidak menyetujui sikap suami untuk menikah lagi. Nah ternyata setelah gugatan itu diajukan ke pengadilan pun, istri dan mungkin juga anak-anak rentan juga mengalami kekerasan. Dalam hal ini kenapa? Karena gugatan di pengadilan itu biasanya hanya berisi atau menuangkan perceraian saja dan kepentingan dan hak-hak istri dan anak itu dikesampingkan.”

Penyiar: “Contohnya yang seperti gimana?”

Tanti Supriatish: “Contohnya bila suami mengajukan gugatan itu biasanya ada beberapa opsi. Pertama dia datang ke pengadilan, kalau pengadilan agama dia datang ke sana, kemudian bagian pendaftaran itu melayani, jadi apa maunya, ada semacam form tertentu yang sudah ada di komputernya. Jadi tinggal mengisi identitas. Nah opsi yang ke dua adalah datang ke lawyer. Keduanya itu, kalau menurut pengalaman saya, sama, jadi lebih mengutamakan kedudukan laki-laki saja. Jadi, cerai, sudah. Tanpa mencantumkan hak-hak istri dan anak.

Penyiar: “Apakah kasus perceraian dengan poligami dan perceraian tanpa poligami sama seperti itu? Untuk pemenuhan haknya ya.”

Tanti Supriatish: “Pada prinsipnya gugatan perceraian sama. Secara praktik yang saya alami dan kita alami seperti itu.”

Penyiar: “Jadi lebih banyak hak perempuan itu tidak terpenuhi ya.”

Tanti Supriatish: “Iya, tidak terpenuhi, tidak tertuangkan.”

Sumber: Transkrip program LIPSTIK “Poligami dalam Konteks Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”, edisi 27 Oktober 2005, Lampiran 2.

Dari penuturan di atas, secara tematik dan semantik tampak bahwa Radio Kosmonita secara tidak langsung hendak mengkritik pemerintah agar memperhatikan pemenuhan hak-hak istri dan anak dalam gugatan perceraian. Radio Kosmonita seolah-olah hendak mengklaim, “Ketika gugatan perceraian diajukan dan hak perempuan diabaikan, dimana keadilan hukum bagi perempuan yang seharusnya ditegakkan oleh aparat hukum?” Dengan penyampaian kritik

tersebut, untuk ke depannya, tentu saja diharapkan dalam pelaksanaan gugatan perceraian, aparat pemerintah tidak lagi bertindak bias gender dan lebih memperhatikan pemenuhan hak-hak istri dan anak dalam perceraian. Dalam hal ini, Radio Kosmonita hendak menekankan salah satu perwujudan konsep kesetaraan gender yaitu dengan adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya dalam bidang ekonomi.

Kritik terhadap pemerintah juga disampaikan secara implisit pada LIPSTIK edisi 20 Oktober 2005 dengan topik ‘Problem Diskriminasi Gender Kaum Perempuan di Papua’. Pada edisi ini, integritas aparat pemerintah dipertanyakan. Aparat pemerintah yang seharusnya mampu menjadi *public figure* anutan masyarakat, malah ikut-ikutan terseret dengan kebiasaan masyarakat yang meresahkan hati warga. Aparat pemerintah yang diharapkan dapat membawa perubahan dan mengusahakan keadilan gender bagi kaum perempuan di Papua, malah tidak punya kredibilitas untuk mendidik dan membimbing warganya.

Penelepon: “Trus tentang ketua adat, apa mereka nggak bimbingan moral, gimana gitu, kan agama pasti mengajarkan yang baik?”

Astrid Wiratna: “Soal kepala suku, agama yang berkembang di sana kebanyakan Nasrani, agama Katolik atau agama Kristen dan ada Fak-fak dan agamanya Islam yang berkembang, tapi agama kalah sama adat. Kenapa? Karena mungkin agama lebih baru dari adat atau mungkin karena sifatnya orang Papua sendiri, saya nggak tahu. Mereka sangat rajin ke gereja tapi bisa jadi Sabtunya itu mereka baru mabuk dan pesta seks. Dua-duanya jalan dan dua-dua itu kayak nggak ada hubungannya. Pulang dari gereja, mau mabuk-mabukan lagi nggak masalah. Dan itupun ditunjukkan oleh bupati. Padahal bupati pernah sekolah di Bandung, di SMA 1. Saya tinggal di kota dimana bupati tinggal di situ, bupati sering kali ditemukan mabuk diangkut sama semua orang, dimasukin mobil, diangkut sama sopir dibawa pulang.”

Penyiar: “Waduh.”

Astrid Wiratna: “Trus besoknya dia baru bangun jam 2 siang.”

Penyiar: “Kalau bupati aja seperti itu ...”

Astrid Wiratna: “Makanya...nanti udah gitu dia ngomong di depan orang-orang tentang kehidupan moral, tentang harus rajin ke gereja...”

Penyiar: “Nggak matching ya bu.”

Astrid Wiratna: “Jadi apa istilahnya, nggak ngefek ya. Tapi dijalankan, agama dijalankan, baca Alkitab iya, tapi seks terus.”

Sumber: Transkrip program LIPSTIK “Problem Diskriminasi Gender Kaum Perempuan di Papua”, edisi 20 Oktober 2005, Lampiran 1.

Dengan pernyataan seperti di atas, secara analisa retorik dan semantik tampak bahwa Radio Kosmonita secara tidak langsung hendak mengkritik pemerintah agar benar-benar mengawasi kinerja aparatnya. Apa yang dilakukan oleh bupati tersebut sudah dipandang sangat keterlaluan dan kelewat batas. Dengan disampaikannya kritik tersebut, diharapkan pemerintah benar-benar mulai mengontrol integritas kinerja aparatnya dan kembali memperhatikan kriteria-kriteria khusus dalam hal menempatkan seseorang untuk memimpin di suatu wilayah.

Peran ‘anjing penjaga’ bagi pemerintah atau yang biasa disebut *watchdog role* juga ditampilkan Radio Kosmonita dalam wujud kritik, pada LIPSTIK edisi 15 Februari 2006 dengan topik ‘*Trafficking* dan Anak yang Dilacurkan’. Pada edisi ini, kritik yang disampaikan adalah mengenai terjadinya kecurangan berupa pemalsuan dokumen, guna dilaksanakannya praktik eksploitasi terhadap anak-anak perempuan di bawah umur.

Farahita: “Buruh migran juga demikian, yang sering terjadi adalah persoalan pemalsuan dokumen. Jadi sebenarnya dia ini adalah anak-anak, karena UU Ketenagakerjaan, misalnya mengharuskan bahwa bekerja sebagai buruh migran ini berusia misalnya ya...itu jadi ada pemalsuan dokumen. Anak-anak dijadikan dewasa, seperti itu. Kemudian juga ada pekerja seks, baik ini yang di prostitut atau juga yang di jalanan. Nah untuk pekerja seks ini tentunya juga ada anak-anak yang kita sebut anak-anak yang dilacurkan, AYLA (Anak Yang diLacurkan).”

Yoris: “Kalau soal pelakunya, saya pikir hampir semuanya bisa saja menjadi pelaku. Polisi atau Lurah misalnya, dia memberikan kemudahan-kemudahan untuk pemalsuan dokumen, itu merupakan pelaku itu.”

Penyiar: “Jadi untuk yang membantu, untuk meloloskan identitas palsu tadi. Oke, baik trus bagaimana modus operandi mereka selain pemalsuan KTP umpamanya.”

Yoris: “Ya pemalsuan KTP, tidak memberikan alamat yang jelas. Kalau misalnya anak mau pergi, itu semuanya diambil identitas anaknya. Dibuat supaya anak tidak tahu nomor telpon rumah, temannya, itu diambil semua, disita semua. Itu yang membuat mereka nanti nggak punya siapa-siapa. Pada akhirnya mereka mudah dikuasai oleh traficker.”

Sumber: Transkrip program LIPSTIK “*Trafficking* dan Anak-anak yang Dilacurkan”, edisi 15 Februari 2006, Lampiran 3.

Dari informasi di atas, secara analisa semantik Radio Kosmonita menginformasikan bahwa aparaturnya pun, disadari ataupun tidak, secara tidak langsung berpotensi untuk menjadi *trafficker*. Ini merupakan suatu hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh pemerintah. Dengan disampaikannya

informasi seperti di atas, secara tidak langsung, Radio Kosmonita hendak memberi masukan bagi pemerintah, agar benar-benar mengawasi kinerja aparatnya. Jangan sampai aparat negara yang seharusnya bisa disegani karena mengusahakan kesejahteraan warga, jadi dipandang rendah oleh masyarakat karena turut mendukung praktik diskriminasi terhadap kaum perempuan. Dalam hal ini, perwujudan konsep kesetaraan gender yang hendak ditekankan Radio Kosmonita adalah dengan adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh perlindungan hukum.

Kritik terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan undang-undang kembali disampaikan secara implisit pada LIPSTIK edisi 28 Juli 2005 dengan topik ‘Kekerasan Seksual pada Anak-anak Perempuan’. Pada edisi ini, giliran pelaksanaan KUHP yang menuai kritik. Dalam edisi ini, kritik yang disampaikan adalah perihal kurang berpihaknya penegak hukum terhadap para korban kekerasan seksual, khususnya anak-anak. Penuntutan bukti-bukti kekerasan seksual yang diminta oleh para penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang berat dan berlebihan karena terkadang tidak bisa dipenuhi oleh korban karena alasan-alasan psikologis.

Penyiar: “Kalau itu kekerasan terjadi pada anak-anak, hukumannya apa pada si pelaku?”

Umi: “Kalau kekerasan seksual, kita memang punya KUHP ya. KUHP tapi kelemahannya di situ yang namanya kekerasan seksual itu harus dibuktikan sebagai kekerasan fisik. Bukti-buktinya fisik..... Nah itu memang bisa diproses hukum, kalau kita memakai UU PKDRT itu hanya cukup satu saksi korban kalau ditemukan alat bukti. Misalnya alat bukti atau pengakuan dari pelaku. Pengakuan ini yang tidak mungkin ya. Oleh karena itu kalau ada kekerasan seksual atau perkosaan, itu yang kita himbaukan itu untuk tidak mandi dulu, tidak membersihkan diri. Kumpulkan barang-barang yang berdekatan.”

Penyiar: “Uuuuh... padahal kita pinginnya cepat-cepat mandi berulang-ulang ya!”

Umi: “Ya, bukti-bukti itu sangat penting karena kita berhadapan dengan proses hukum yang sebenarnya belum begitu memihak pada korban ya”

Penyiar: “Betul-betul. Minta bukti lah, macam-macam ya.”

Umi: “Nah, sebenarnya kalau di luar negeri, kekerasan seksual kalau menimpa anak-anak itu apapun alasannya sudah dianggap rape. Anak itu tidak perlu ditanya dan diperiksa, kalau itu dilakukan orang dewasa, maka itu sudah dianggap... karena anak-anak dianggap tidak mempunyai informed consent. Persetujuan untuk melakukan hubungan seksual, maka itu namanya rape.”

Penyiar: “Seharusnya di Indonesia sudah harus ditinjau kembali ya.”

Umi: “Kita mencoba untuk memasukan itu dalam sistem hukum kita tapi ya masih ada tarik ulur ya dengan para penegak hukum.”

Sumber: Transkrip program LIPSTIK “Kekerasan Seksual pada Anak-anak Perempuan”, edisi 28 Juli 2005, Lampiran 4.

Dari penuturan nara sumber di atas, secara retorik tampak bahwa Radio Kosmonita tidak setuju terhadap sikap pemerintah yang seringkali menyulitkan korban kekerasan seksual. Radio Kosmonita hendak memberi masukan bagi pemerintah dalam hal pembuatan undang-undang yang mengatur tentang kasus kekerasan seksual. Diharapkan agar dalam membuat undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual, pemerintah lebih berpihak kepada korban yang notabene berada dalam posisi yang sangat lemah (apalagi anak-anak) dan membutuhkan pembelaan bukan dakwaan. Dalam hal ini, perwujudan konsep kesetaraan gender yang hendak ditekankan Radio Kosmonita adalah dengan adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh perlindungan hukum.

Masukan tersendiri bagi pemerintah dalam mengusahakan kesejahteraan masyarakat juga tergambar dalam LIPSTIK edisi 15 Februari 2006 dengan topik ‘*Trafficking* dan Anak yang Dilacurkan’. Pada edisi ini, dipaparkan bahwa salah satu latar belakang pendukung praktik *trafficking* dan pelacuran anak-anak perempuan adalah kemiskinan yang dialami masyarakat Indonesia. Keadaan ekonomi yang terpuruk membuat para orang tua merelakan anaknya untuk bekerja, tanpa mensinyalir adanya praktik pelacuran terhadap anak-anak perempuan. Tentunya hal ini tidak akan terjadi jika kesejahteraan masyarakat terjamin.

Farahita: “Orang tua ini kadang secara tidak langsung karena kemiskinan tadi ya...mereka menjual anaknya untuk dipekerjakan. Walaupun misalnya ketidaktahuan awalnya ini yang membawa anaknya akan masuk ke dunia yang dilacurkan. Tapi karena ketidakberdayaan, karena faktor ekonomi yang menyebabkan mereka kadang-kadang membiarkan anaknya untuk bisa bekerja di sana. Pada saat-saat tertentu memberikan uang ke rumah untuk membantu ekonomi keluarga. Kemudian ada juga suami, yang secara sengaja mengirim si istri untuk keuntungan ekonomi si laki-laki itu, si suami itu. Artinya kan, kemudian menempatkannya dalam status bukan relasi sebagai istri dan suami tapi kan yang kemudian terjadi adalah bahwa si istri menjadi budak. Jadi budak seks untuk masuk ke prostitusi itu.”

Farahita: “Nah tadi kalau mas Yoris sudah bilang, penyebabnya itu tadi karena memang banyak ada penipuan, penjeratan hutang sehingga mereka mau nggak mau harus masuk atau bertahap masuk ke sana.”

Penyiar: “Kayaknya pendidikan juga ikut berpengaruh ya mas Yoris”

Yoris: *“Iya, kalau dilihat masalah pendidikan itu sangat berpengaruh. Kita lihat di budaya yang melekat di Indonesia, perempuan ngapain sekolah tinggi-tinggi, toh pada akhirnya ke dapur juga ya...itu juga. selain itu ya, kalau tadi ngomong anak, anak itu 18 tahun ke bawah ya, biasanya mereka digunakan untuk menjual narkotik, dijadikan pengemis, trus diambil organ tubuhnya untuk kepentingan kedokteran apa lah. Itu yang sering terjadi.”*

Sumber: Transkrip program LIPSTIK *“Trafficking dan Anak-anak yang Dilacurkan”*, edisi 15 Februari 2006, Lampiran 3.

Dari penuturan nara sumber di atas, secara tematik tampak juga bahwa pemerintah hendak disadarkan akan masih adanya pandangan dalam masyarakat bahwa ‘anak-anak perempuan tidak perlu bersekolah tinggi’. Pandangan masyarakat ini pun sebenarnya juga tidak terlepas dari rendahnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal-hal seperti tersebut di atas mungkin sempat terlepas dari perhatian pemerintah, namun melalui program LIPSTIK, Radio Kosmonita hendak menjadi partner yang mengingatkan pemerintah akan hal-hal yang patut menjadi perhatiannya. Dalam hal ini, Radio Kosmonita hendak menekankan salah satu perwujudan konsep kesetaraan gender yaitu dengan adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya dalam bidang pendidikan.

Dengan disampaikan berbagai kritik dan masukan bagi pemerintah, Radio Kosmonita berusaha menjadi media massa yang berperspektif gender. Radio Kosmonita menjalankan perannya sebagai *watchdog* bagi kekuasaan dan tidak terjerumus menjadi pelestari kekuasaan, sehingga perempuan tidak lagi menjadi korban dari aroganisme pelanggaran kekuasaan (Siregar, 2002, p.219). Namun satu hal yang patut menjadi perhatian adalah pentingnya bagi Radio Kosmonita untuk juga memberi ruang bagi pemerintah untuk berbicara. Program siaran LIPSTIK yang diklaim sebagai ruang publik bagi perempuan hendaknya juga mewujudkan kesamaan kesempatan untuk berpendapat, termasuk juga bagi pihak pemerintah. Dalam program-program siaran LIPSTIK yang diteliti, pihak pemerintah tidak tampak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Hal ini tentunya sangat penting sekali dalam upaya pembentukan ruang publik bagi perempuan yang demokratis. Dengan terwujudnya ruang publik bagi perempuan yang demokratis, maka perempuan tidak hanya memandang berbagai

permasalahan dari satu sisi saja, melainkan dapat memperluas wawasannya dari berbagai sisi.

5.5.1.3 Sikap Radio Kosmonita terhadap Budaya Patriarki

Dalam masyarakat, nilai patriarki dipahami sebagai kekuasaan laki-laki, hubungan kuasa dengan apa laki-laki menguasai perempuan, dan untuk menyebut sistem yang membuat perempuan tetap dikuasai melalui bermacam-macam cara (Bhasin, 1996, p.1). Dalam sistem patriarki, laki-laki mengontrol daya produktif dan reproduktif perempuan, seksualitas, gerak perempuan, harta milik dan sumber daya lainnya. Saat ini, hampir semua institusi sosial, baik lembaga negara, hukum, pendidikan, agama, norma-norma, media massa, keluarga, maupun militer, memakai nilai-nilai patriarki. Dengan kenyataan tersebut, perempuan akan selalu mengalami diskriminasi gender di seputar kehidupannya.

Radio Kosmonita dengan fungsi ruang publik (*public sphere*) bagi perempuan, hendak menyampaikan kritik atas penerapan budaya patriarki dalam masyarakat yang telah banyak membawa kerugian bagi kaum perempuan. Hal ini disampaikan secara implisit dan eksplisit dari berbagai penggambaran penderitaan perempuan akibat penerapan nilai patriarki dalam masyarakat. Sebagai contoh, Astrid Wiratna, nara sumber dalam program LIPSTIK edisi 20 Oktober 2005, menceritakan bagaimana budaya patriarki begitu dominan dalam masyarakat Papua, sampai-sampai kaum perempuan Papua yang terkenal ekspresif dan agresif sekalipun bisa jadi sosok yang takut dan patuh jika berhadapan dengan suami mereka.

Penyiar: "Ok tapi perempuan di sana berani nggak sih bu untuk mengungkapkan atau ngomong gitu?"

Astrid Wiratna: "Mereka sangat ekspresif dan agresif kalau dibandingin sama orang Jawa, tapi kalau sama suami takut sekali. Kalau sama orang lain nggak. Di antara mereka sendiri juga mungkin bisa berkelahi. Tapi sama suami takut, itu udah dari sananya, itu adatnya. Mereka nurut karena adatnya begitu."

Sumber: Transkrip program LIPSTIK "Problem Diskriminasi Gender Kaum Perempuan di Papua", edisi 20 Oktober 2005, Lampiran 1.

Kritik atas penerapan budaya patriarki dalam masyarakat juga disampaikan oleh Tanti Supriatnih, nara sumber dalam program LIPSTIK edisi 27

Oktober 2005. Tanti menuturkan bagaimana dominannya budaya patriarki dalam masyarakat sehingga menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan bagi perempuan. Salah satu bentuknya adalah dikesampingkannya kepentingan dan hak-hak istri dan anak dalam perceraian. Selain itu, budaya patriarki yang mendominasi sistem hukum membuat suami bisa berpoligami tanpa memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Penyiar: “Ya mbak Tanti, dalam UU pun sudah dijelaskan gitu ya, ada beberapa syaratnya kalau mau menikah lagi. Tapi syarat-syarat itu kadang tidak terpenuhi ya sama si laki-laki itu. Itu hukum memandangnya gimana, mbak Tanti?”

Tanti Supriatish: “Mungkin gini ya, bahwa kita bicara dalam konteks poligami itu kan terjadi dalam masyarakat yang memegang nilai dan struktur patriarki. Artinya nilai dan struktur yang mengutamakan laki-laki dan menomorduakan perempuan, dimana menempatkan laki-laki sebagai posisi dominan atau subyek dan perempuannya sebagai obyek. Nah ini tentu saja menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan. Dalam kaitannya dengan poligami, biasanya berujung pada gugatan perceraian sepihak bila ternyata si istri tidak menyetujui sikap suami untuk menikah lagi. Nah ternyata setelah gugatan itu diajukan ke pengadilan pun, istri dan mungkin juga anak-anak rentan juga mengalami kekerasan. Dalam hal ini kenapa? Karena gugatan di pengadilan itu biasanya hanya berisi atau menuangkan perceraian saja dan kepentingan dan hak-hak istri dan anak itu dikesampingkan.”

Sumber: Transkrip program LIPSTIK “Poligami dalam Konteks Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”, edisi 27 Oktober 2005, Lampiran 2.

Selanjutnya, kritik atas penerapan budaya patriarki dalam masyarakat juga disampaikan oleh Yoris, nara sumber dalam program LIPSTIK edisi 15 Februari 2006. Yoris menceritakan bagaimana dominasi budaya patriarki dalam masyarakat telah menciptakan kondisi lemah bagi perempuan. Nilai patriarki membuat masyarakat mengkondisikan perempuan dalam posisi yang lemah dan menjadi makhluk nomor dua dalam kehidupan, sehingga menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan bagi perempuan.

Yoris: “Tapi ada satu lagi yang mungkin perlu jadi catatan di Indonesia, misalnya persoalan budaya atau persoalan sistem sosial patriarki, dimana dunia ini dikuasai laki-laki membuat perempuan itu terkondisi untuk menjadi lemah. Jadi lemahnya itu karena konstruksi sosial. Kenapa dia menjadi lemah dan menjadi pelacur? Karena kita mengkondisikan mereka. Kita lihat di budaya, di mana-mana, dunia pendidikan, perempuan itu memang dilemahkan.”

- Yoris: *“Akhirnya kalau saya simpulkan ya..tetap perempuan itu yang menjadi punya masalah pada akhirnya.”*
- Penyiar: *“Ujung-ujungnya pihak kita juga ya...perempuan ini yang harus bisa... bukan harus disalahkan, tapi memang sudah ininya ya...hasil akibatnya yang kita tanggung ya...”*
- Yoris: *“Itu konstruksi, makanya kejadian saat ini itu karena konstruksi yang sejak dulu dipaksakan supaya perempuan itu menjadi nomer 2 dalam kehidupan. Nggak ada keputusan-keputusan penting itu yang dilahirkan oleh perempuan, kalau bukan ada bisikan dari suaminya, dari belakang. Perempuan itu nggak punya hak untuk bersuara setelah si laki-laki bersuara duluan. Kalau ngegonggi nggak pa-pa, tapi mendahului janganlah. Nah itu yang terjadi di masyarakat.”*

Sumber: Transkrip program LIPSTIK *“Trafficking dan Anak-anak yang Dilacurkan”*, edisi 15 Februari 2006, Lampiran 3.

Dari penuturan nara sumber di atas, secara semantik tampak bahwa Radio Kosmonita hendak memberitahukan kepada pendengarnya bahwa penerapan budaya patriarki telah membuat konstruksi sosial tentang citra perempuan sebagai pihak yang lemah, yang mana menyebabkan masyarakat memandang rendah perempuan, dan pada akhirnya sampai pada level mendiskriminasi kaum perempuan. Melalui penuturan tersebut pulalah, secara tematik tampak bahwa Radio Kosmonita hendak menyadarkan masyarakat akan adanya konstruksi sosial yang merugikan kaum perempuan, dengan harapan agar masyarakat mulai sadar untuk tidak lagi mendiskriminasi kaum perempuan.

Dengan memberikan ruang publik bagi kaum perempuan untuk menyuarakan penderitaannya, menyampaikan kritik terhadap pemerintah dan atas penerapan budaya patriarki dalam masyarakat, Radio Kosmonita berusaha menjadi media massa yang berperspektif gender, yang turut mendukung perwujudan konsep kesetaraan gender. Radio Kosmonita berusaha mendukung perwujudan konsep kesetaraan gender dengan mengangkat permasalahan perempuan pada arus utama (*mainstream*), menjalankan peran sebagai *watchdog* bagi kinerja aparat pemerintah yang bias gender dan juga menyuarakan penderitaan perempuan atas penerapan budaya patriarki dalam masyarakat. Ruang publik yang disediakan oleh Radio Kosmonita bukan hanya memindahkan “ruang privat” (persoalan dapur, kamar dan lain-lain) untuk dipertontonkan ke dunia publik, melainkan mampu mengangkat pemikiran-pemikiran kaum perempuan untuk menjadi perhatian masyarakat luas.

Namun, satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa ruang publik yang disediakan Radio Kosmonita belum memenuhi kriteria ruang publik yang sebenarnya. Jika ruang publik dipahami sebagai wilayah sosial yang terbuka, bebas dari sensor dan dominasi, maka hal itu belum tergambar sepenuhnya dalam program LIPSTIK. Apabila ruang publik dimaknai sebagai ruang dimana warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul, serta menyiarkan segala bentuk pemikiran dengan cara-cara yang etis, yang berkaitan dengan kepentingan umum, maka hal tersebut juga belum sepenuhnya terwujud dalam program LIPSTIK. Tidak setiap unsur dalam masyarakat dihadirkan dengan terbuka terhadap permasalahan, jujur terhadap kepentingan bersama, dan berbicara tentang kebaikan yang universal.

Semua hal di atas tergambar dari ke empat program LIPSTIK yang diteliti dalam penelitian ini. Sebut saja pihak pemerintah yang seringkali diberi kritik dan masukan atas kinerjanya yang bias gender, namun dalam *talk show* ini sendiri, pihak pemerintah tidak pernah dihadirkan untuk memberikan klarifikasi atau paling tidak menerima masukan dan kritik tersebut secara langsung. Contoh lain mungkin dapat dilihat dari tidak dihidirkannya pihak oposisi dari kaum perempuan itu sendiri, misalnya saja figur seorang suami yang pernah berpoligami atau figur seorang *trafficker* atau bahkan figur seorang yang pernah melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak perempuan. Ini semua menunjukkan bahwa masih ada batasan-batasan dan dominasi yang dibuat oleh pihak Radio Kosmonita. Ruang publik yang dihadirkan Radio Kosmonita belum bebas dari dominasi dan cenderung terkesan kurang demokratis karena hanya penuh dengan suara perempuan saja. Oleh karenanya, opini-opini yang terbentuk dan berkembang dalam program LIPSTIK sebagai ruang publik tidak beragam, sehingga pendengar tidak bisa memperluas perspektifnya dengan mengapresiasi sudut pandang lain tentang berbagai persoalan gender.

Dengan ruang publik yang hanya penuh dengan suara perempuan saja, dapat dikatakan bahwa sebenarnya Radio Kosmonita belum sepenuhnya mewujudkan kesetaraan gender. Apabila kesetaraan gender dipahami sebagai kesamaan bagi perempuan dan laki-laki, maka apa yang dilakukan Radio Kosmonita baru sampai pada level pengangkatan suara perempuan saja ke ruang

publik. Radio Kosmonita belum sampai pada level kesetaraan dimana ada kesamaan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk menyampaikan pendapatnya pada ruang publik yang disediakan Radio Kosmonita. Hal ini tentunya akan menimbulkan persepsi bahwa Radio Kosmonita hanya memihak salah satu gender saja, yaitu perempuan. Padahal kesetaraan gender itu berbicara tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Bukan suatu hal yang buruk, bahkan merupakan suatu hal yang baik, karena sebagai radio dengan segmentasi perempuan, Radio Kosmonita mampu mengangkat pemikiran-pemikiran kaum perempuan untuk menjadi perhatian masyarakat luas. Hanya saja perlu diperhatikan untuk juga meramaikan ruang publik Radio Kosmonita dengan berbagai opini dari berbagai pihak, sehingga kaum perempuan sendiri juga akan bertambah wawasannya dan diperluas cakrawalanya dan tidak hanya memandang berbagai permasalahan gender dari sisi perempuan saja.

1.5.2 Radio Kosmonita dan Upaya Pemberdayaan Perempuan (*Women Empowerment*)

Pemberdayaan terhadap kaum perempuan merupakan salah satu upaya untuk mereduksi ragam dan bentuk ketidakadilan gender terhadap perempuan. Sedangkan pemberdayaan perempuan (*women empowerment*) itu sendiri didefinisikan sebagai upaya memberikan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang hak dan tanggung jawab sebagai perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, di samping memberikan kemampuan dan berbagai ketrampilan hidup untuk hidup mandiri (Siman, 2006, p.99). Melalui pemberdayaan, berarti perempuan mampu mengatur hidupnya sendiri. Perempuan dapat menentukan agendanya sendiri, menambah keterampilannya, meningkatkan kepercayaan dirinya, memecahkan masalahnya dan membangun kemandiriannya (www.menegpp.go.id).

Pendidikan merupakan salah satu solusi alternatif yang dapat dilakukan untuk memberdayakan kaum perempuan, dan media massa, termasuk radio dengan berbagai karakteristik dan fungsi edukatif yang melekat padanya, tentunya merupakan sarana efektif untuk memfasilitasi upaya pemberdayaan bagi kaum perempuan, guna meminimalisir ketidakadilan gender terhadap kaum perempuan.

Dalam program LIPSTIK, Radio Kosmonita turut memainkan peran pemberdayaan perempuan, melalui pemberian berbagai informasi yang informatif, edukatif dan antisipatif. Radio Kosmonita berusaha memberikan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kaum perempuan tentang hak dan tanggung jawab sebagai perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, Radio Kosmonita juga berusaha untuk memberikan kemampuan dan berbagai ketrampilan hidup bagi perempuan untuk dapat hidup mandiri, sehingga perempuan mampu mengatur hidupnya sendiri, menentukan agendanya sendiri, menambah keterampilannya, meningkatkan kepercayaan dirinya, memecahkan masalahnya dan membangun kemandiriannya.

Salah satu fungsi media massa yang disampaikan oleh Jay Black dan Frederick C. Whitney adalah untuk memberikan informasi kepada khalayaknya (Nurudin, 2003, p.62). Peran pemberdayaan perempuan dalam bentuk pemberian penerangan informatif dapat dilihat pada setiap awal program LIPSTIK. Penyiar Radio Kosmonita selalu mengawali *talk show* dengan menanyakan pada nara sumber yang dihadirkan tentang ‘apa dan bagaimana sebenarnya’ seputar topik yang hendak dibicarakan. Sebagai contoh, dalam program LIPSTIK edisi 27 Oktober 2005 dengan topik ‘Poligami dalam Konteks Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak’, di awal program, nara sumber menginformasikan pada pendengar tentang hakekat poligami di Indonesia. Di tengah-tengah acara, nara sumber pun memberikan informasi kepada pendengarnya tentang syarat-syarat alasan diajukan gugatan perceraian.

Penyiar: “Sebenarnya kalo dalam hukum, poligami itu definisinya apa sih mbak Tanti?”

Tanti Supriatish: “Bila salah satu pihak itu mempunyai pasangan lebih dari 1 orang.”

Penyiar: “Jadi lebih dari 1 orang, gitu ya. Sebenarnya diatur nggak sih dalam hukum atau sah nggak sih, boleh nggak orang itu lebih dari 1, seperti itu?”

Tanti Supriatish: “Kalo kita bicara di dalam konteks UU perkawinan itu kan pada dasarnya monogami ya. Jadi seorang istri mempunyai seorang suami begitu juga sebaliknya. Akan tetapi, kemudian di dalam pasal selanjutnya itu bertentangan ya. Jadi UU perkawinan itu memperbolehkan bagi seorang laki-laki memiliki pasangan lebih dari satu orang dengan beberapa pengecualian, antara lain: istri tidak bisa memberikan keturunan, mungkin ia cacat badan dan punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan.”

Tanti Supriatish: “Dan lagi kan untuk perceraian itu, UU kita sudah mengatur PP nomor 9 tahun 75 bahwa alasan-alasan atau sebab-sebab yang diperbolehkan untuk bercerai itu antara lain: pertama salah satu pihak

berbuat zinah, kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain 2 tahun berturut-turut, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Kemudian salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, kemudian salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dan yang ke enam perselisihan atau pertengkaran yang secara terus-menerus. Jadi keenam hal itu harus terbukti di pengadilan.”

Sumber: Transkrip program LIPSTIK “Poligami dalam Konteks Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”, edisi 27 Oktober 2005, Lampiran 2.

Dari kutipan percakapan di atas, secara skematik dapat dilihat bahwa Radio Kosmonita hendak membekali pendengarnya dengan berbagai informasi tentang poligami dari sisi hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan memberikan informasi tersebut, niscaya kaum perempuan dapat memperluas wawasannya tentang poligami, sehingga tidak lagi menjadi korban pembodohan dalam praktik poligami, seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat poligami. Dengan demikian maka Radio Kosmonita turut mendukung pemberdayaan terhadap perempuan dalam upaya perwujudan kesetaraan gender.

Peran pemberdayaan perempuan dalam bentuk pemberian penerangan informatif juga tampak pada LIPSTIK edisi 15 Februari 2006 dengan topik ‘*Trafficking* dan Anak yang Dilacurkan’. Penyiar Radio Kosmonita mengarahkan alur *talk show* dengan awalan informasi pengenalan pada pendengar tentang apa itu *trafficking* dan bagaimana latar belakang terjadinya praktik *trafficking*. Di tengah-tengah acara, nara sumber pun memberikan informasi kepada pendengarnya tentang bentuk-bentuk *trafficking* dan seluk beluk praktik pelacuran anak-anak perempuan.

Penyiar: “Sebenarnya, apa sih yang disebut *trafficking* itu sendiri mbak?”

Farahita: “Konsep yang berkembang selama ini tentang *trafficking* kita anggap sebagai perdagangan manusia. Jadi yang diartikan sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman dan kekerasan dan bertujuan untuk eksploitasi.”

Penyiar: “Ini penjualan ya...prosesnya..”

Farahita: “Ada prosesnya, jadi kalau misalnya kita lihat bagaimana manusia ini kemudian dipindahkan oleh manusia juga tentunya pelakunya, kemudian akan ditampung di sebuah tempat dan diterima juga oleh manusia. Tapi yang menjadi pemikirannya atau garis besarnya dalam proses itu terjadi ancaman, selain ancaman juga ada kekerasan yang menyertainya, juga ini bertujuan untuk eksploitasi.”

Penyiar: “Trus kenapa sampai terjadi *trafficking* ini sendiri mbak Farah?”

Farahita: “Iya, mungkin kalau kita melihat ya mbak ya...sekarang ini memang yang menjadi korban dari trafficking sebagian besar adalah perempuan dan anak. Karena memang posisi perempuan dan anak ini sangat rentan ya? Dan banyak faktor yang orang melihat bahwa perempuan dan anak ini menjadi kelompok yang tidak berdaya. Penyebabnya ini sangat beragam mbak, jadi misalnya sekarang ini mungkin orang-orang banyak pikir ya... kenapa sih kemudian ada orang yang kemudian direkrut orang untuk kemudian bekerja di salah satunya misalnya ya.. pelacuran atau prostitut? Memang alasan strukturalnya adalah masalah kemiskinan, kalau kita lihat, memang banyak ya...kondisinya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau melihat lagi ada 3 hal yang ikut menyertainya. Yang pertama persoalan kemiskinan, ada juga persoalan seksualitas perempuan, jadi pemahaman yang sampai sekarang sampai di masyarakat bahwa keperawanan menjadi hal yang paling utama, jadi ketika perempuan ini tidak perawan kemudian yang terjadi adalah dia menjadi tidak bisa masuk ke perannya.”

Penyiar: “Oke, mungkin bisa dijelaskan bentuk-bentuk dari trafficking ini mbak?”

Farahita: “Berbentuk banyak ya... jadi ini berkedok pada sebuah pekerjaan yang menimpa perempuan dan anak. Antara lain yaitu misalnya buruh migran, kalau kita sebut sebagai tenaga kerja wanita, itu kemudian ada pekerja rumah tangga atau PRT. Nah PRT ini tentunya 2 hal yang kita lihat juga banyak yang menjadi PRT ini perempuan dan anak. Buruh migran juga demikian, yang sering terjadi adalah persoalan pemalsuan dokumen. Jadi sebenarnya dia ini adalah anak-anak karena UU Ketenagakerjaan, misalnya mengharuskan bahwa bekerja sebagai buruh migran ini berusia misalnya ya...itu jadi ada pemalsuan dokumen. Anak-anak dijadikan dewasa, seperti itu. Kemudian juga ada pekerja seks, baik ini yang di prostitut atau juga yang di jalanan. Nah untuk pekerja seks ini tentunya juga ada anak-anak yang kita sebut anak-anak yang dilacurkan, AYLA.”

Penyiar: “AYLA sendiri itu sebenarnya apa sih pengertiannya?”

Yoris: “Sebenarnya itu pekerja seks sekarang ini banyak sekali, sekarang menjadi trend anak kecil itu menjadi tujuan dari para om-om. Jadi AYLA itu singkatan dari Anak Yang diLacurkan. Biasanya para calo atau para traficker mencari anak-anak itu di desa dengan cara dibujuk rayu, memberi iming-iming dengan gaji besar, nanti mau dipekerjakan di perusahaan yang wah, sehingga orang-orang akan tertarik. Atau mereka pacari anak itu lalu mereka buat seakan-akan benar-benar mencintai, ternyata setelah sampai di suatu tempat baru mereka masukan secara perlahan-lahan. Sehingga anak-anak menjadi sangat tergantung pada mereka. Dan mereka selalu membuat anak-anak itu tidak bisa berdaya, misalnya uangnya diambil semua, dipaksa supaya punya hutang, itu yang sering terjadi. Dan biasanya dikirim ke beberapa daerah di Indonesia. Dan Jawa Timur termasuk sending area.”

Sumber: Transkrip program LIPSTIK “*Trafficking dan Anak-anak yang Dilacurkan*”, edisi 15 Februari 2006, Lampiran 3.

Dari penuturan di atas, secara analisa skematik tampak bahwa Radio Kosmonita hendak membekali pendengarnya dengan berbagai informasi tentang bentuk-bentuk *trafficking* dan seluk beluk praktik pelacuran anak-anak perempuan. Dengan memberikan informasi tersebut, niscaya kaum perempuan dapat memperluas wawasannya tentang *trafficking* dan pelacuran anak-anak perempuan, sehingga perempuan dapat mewaspadaikan dirinya agar tidak terjerumus

dalam praktik *trafficking* ataupun pelacuran anak-anak perempuan. Dengan memberikan informasi tersebut, maka Radio Kosmonita juga turut mendukung pemberdayaan terhadap perempuan dalam upaya perwujudan kesetaraan gender.

Pada LIPSTIK edisi 28 Juli 2005 pun, pendengar diperkenalkan dengan bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak perempuan yang selama ini banyak terjadi.

Umi: *“Ya, untuk 6 bulan terakhir ada 13 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dan 4 di antaranya adalah terhadap anak. Anak-anak di sini berusia 18 tahun ke bawah.”*

Penyiar: *“Bentuknya apa aja mbak?”*

Umi: *“Kalau kekerasan pada anak itu, incest, jadi hubungan sedarah yang dilakukan oleh keluarga, kemudian ada juga pencabulan oleh orang lain tapi masih dekat dengan keluarga, seperti tetangga, orang yang dianggap selama ini dekat, gurunya.”*

Sumber: Transkrip program LIPSTIK “Kekerasan Seksual pada Anak-anak Perempuan”, edisi 28 Juli 2005, Lampiran 4.

Dari kutipan dialog di atas, secara semantik dapat dilihat bahwa Radio Kosmonita hendak membekali pendengarnya dengan informasi tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak-anak perempuan yang marak terjadi. Dengan memberikan informasi tersebut, niscaya para ibu dapat memperluas wawasannya tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak-anak perempuan, sehingga mereka dapat mengantisipasi kekerasan seksual terhadap anak-anak perempuan sejak dini. Dengan demikian maka Radio Kosmonita turut mendukung pemberdayaan terhadap perempuan dalam upaya perwujudan kesetaraan gender.

Dalam program LIPSTIK, Radio Kosmonita tidak hanya memberikan pengenalan terhadap berbagai bentuk diskriminasi gender dan seluk-beluknya, tetapi juga memperkenalkan Savy Amira, *Women Crisis Center* kepada pendengarnya, sebagai LSM yang menyediakan dirinya untuk membantu menangani kekerasan-kekerasan yang dihadapi oleh perempuan. Hal ini tergambar dalam LIPSTIK edisi 27 Oktober 2005 dan edisi 28 Juli 2005.

Penyiar: *“Dan tentunya kalau misal perempuan sedang mengalami hal-hal seperti ini dan ingin menghubungi Savy Amira bisa kemana nih?”*

Tanti Supriatsih: *“Bisa ke 8794639”*

Penyiar: “Sebenarnya Savy Amira ini menangani apa saja?”

Tanti Supriatish: “Kekerasan perempuan dan anak perempuan. Meliputi masalah di ranah privat, perceraian dan di ranah publik, kejahatan terhadap kesusilaan.”

Sumber: Transkrip program LIPSTIK “Poligami dalam Konteks Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”, edisi 27 Oktober 2005, Lampiran 2.

Penyiar: “Sayang ya waktunya habis. Ok, mungkin ada Para Kosmonita ada yang belum mengenal betul, apa sih Savy Amira, Women Crisis Center ini? Tugasnya ngapain? Yang jelas ini adalah LSM yang sangat concern menangani kekerasan-kekerasan terhadap perempuan. Kalau misalnya ada kasus seperti ini, bagaimana Savy Amira menanganinya?”

Umi: “Kalau untuk awal korban datang, misalkan dia ditemani, kita biasanya langkah awal itu secara psikologisnya dulu. Kita ajak dia bicara, kalau bisa diajak bicara. Karena tipikal korban datang kan lain-lain ya, kalau incest yang terjadi di anak-anak, umumnya mereka diam dan tidak bisa bercerita. Kalau memang didampingi orang tuanya, awal kali kita bicara dengan orang tuanya. Lalu setelah itu biasanya kita sampai mendampingi ke proses hukum. Pendampingan untuk penyidikan, BAP sampai ke pengadilan.”

Penyiar: “Lokasi Savy Amira ini sendiri dimana mbak?”

Umi: “Kalau kita melakukan pendampingan dengan dua cara, hotline atau bertemu langsung. Kalau hotline di 8794639, sedangkan kalau alamatnya sendiri di Rungkut Asri Timur 44 atau Rungkut Kidul RK 4F / 23.”

Sumber: Transkrip program LIPSTIK “Kekerasan Seksual pada Anak-anak Perempuan”, edisi 28 Juli 2005, Lampiran 4.

Informasi seperti tersurat di atas mungkin tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Namun dengan diperkenalkannya Savy Amira, Women Crisis Center kepada para pendengar, sebagai LSM yang menyediakan dirinya untuk membantu menangani kekerasan-kekerasan yang dihadapi oleh perempuan, niscaya perempuan akan tahu kemana mereka harus mengadu dan meminta pertolongan jika mereka mengalami kekerasan akibat diskriminasi gender. Dengan demikian, oleh Radio Kosmonita dan Savy Amira, perempuan akan terbantu dalam mengupayakan kesetaraan gender bagi dirinya. Melalui pemberian penerangan informatif kepada para pendengarnya yang notabene 85% sampai dengan 90% adalah perempuan, maka Radio Kosmonita bisa dikatakan turut memberikan tambahan pengetahuan baru pada perempuan dalam upaya mendukung pemberdayaan terhadap kaum perempuan.

Selain dalam bentuk pemberian penerangan informatif, pemberdayaan perempuan dalam program LIPSTIK nampak juga dalam bentuk pemberian penerangan edukatif berupa pemberian kemampuan dan berbagai ketrampilan

hidup. Salah satunya adalah dalam bentuk ketrampilan memberikan *sex education* bagi anak, seperti tergambar dalam LIPSTIK edisi 28 Juli 2005, dengan topik ‘Kekerasan Seksual pada Anak-anak Perempuan’.

Penelepon: “Kemudian, kira-kira sejak usia berapa kita bisa berikan sexual education pada anak? Dan minta tolong bisa diberitahu caranya yang disesuaikan dengan usianya.”

Ana: “Menurut saya berikan sex education sedini mungkin. Bahkan mungkin sejak di dalam perut. Kalau kamu perempuan ya jadilah ini, jadi diajak berbicara begitu ya. Ketika lahir juga kita sudah mulai mengenalkan. Misalnya ketika kita memandikan anak perempuan, kakak laki-lakinya diajak dan dikasih tahu ‘ini adik perempuan. Kenapa perempuan? Karena adik punya vagina, kamu punya penis. Sama nggak kira-kira. Nah ini fungsinya akan berbeda’. Jadi dari kecil dikenalkan tentang perbedaan kelamin dan fungsi-fungsi reproduksi. Nah fungsi itu yang penting. Jadi sex education itu merujuk pada fungsi reproduksi kita, bukan mengajarkan kita untuk melakukan hubungan seksual. Nah masyarakat banyak menganggap bahwa sex education itu bagaimana melakukan hubungan seksual. Sebenarnya kan bagaimana kita mengenalkan alat-alat reproduksi kita, bagaimana kita memperhatikan dan memfungsikannya secara benar dan bagaimana orang lain bisa menghargai fungsi itu. Nah kalau itu ditanamkan maka bagi anak laki-laki, dia akan respect pada anak perempuan dan tidak kemudian melecehkan dan melakukan serangan atas alat-alat tersebut. Kalau anak perempuan, mereka akan memahami bahwa alat-alat tersebut mempunyai fungsi yang sangat kompleks dan dia wajib untuk menjaganya.”

Penyiar: “Mbak Umi mungkin mau menambahkan?”

Umi: “Untuk asertifnya, seperti pada perempuan kita beritahukan ada 3 bagian yang tidak boleh dipegang. Kita bisa pakai boneka laki-laki dan perempuan. Pada boneka perempuan kita bisa tunjukkan bagian payudara, vagina dan pantat itu yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Kalau laki-laki itu ada bagian tertentu juga, seperti itu.”

Penyiar: “Mbak Ana, mbak Umi, tadi kan kalau kita ingin memperkenalkan pada anak-anak organ vital, ini tidak terbiasa berbicara pada anak-anak seperti itu. Sehingga anak-anak sampai SMP sampai SMA tidak ada pendidikan seksual untuk anak-anak. Mulut kita untuk memulainya susah, mungkin bisa dikasih contoh bagaimana memulainya?”

Ana: “Saya rasa memang nggak biasa ya, cuman memang kita coba tunjukkan perbedaan, kenapa yang bisa punya adik hanya perempuan, hanya ibu. Itu untuk menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda.”

Penyiar: “Ngobrolnya waktu kapan ya mbak?”

Ana: “Ya waktu kita misalnya lagi ganti baju, nggantiin baju dia, mandiin dia. Ini namanya apa, ini penis. Fungsinya untuk apa, untuk pipis. Jadi sebatas pengetahuan itu. Nanti kalau berkembang usianya kita mulai tingkatan, itu fungsinya untuk apa selain untuk pipis, kemudian kenapa perempuan menstruasi.”

Sumber: Transkrip program LIPSTIK “Kekerasan Seksual pada Anak-anak Perempuan”, edisi 28 Juli 2005, Lampiran 4.

Tidak sedikit para orang tua yang mengalami kendala dalam memberikan *sex education* bagi anaknya seperti yang dialami oleh penelepon di atas. Melalui

penerangan edukatif tersebut, pendengar akan belajar bagaimana cara memberikan pendekatan *sex education* pada anak. Penerangan edukatif seperti tersurat di atas tentunya juga sangat dibutuhkan bagi para ibu dalam usahanya mengantisipasi kekerasan seksual pada anak-anak mereka. Dengan disampaikannya penerangan edukatif seperti itu, tentunya Radio Kosmonita turut mendukung pemberdayaan terhadap perempuan dalam upaya perwujudan kesetaraan gender.

Bentuk lain dari pemberian kemampuan dan berbagai ketrampilan hidup, ditunjukkan oleh Radio Kosmonita melalui pemberian tips menjawab pertanyaan anak-anak seputar penyimpangan seksual yang dihadapi salah seorang penelepon.

Penelepon: “Saya mau nanya ya, kalau di kota-kota besar ini kan banyak waria ya. Bagaimana menjelaskan sama anak-anak tentang waria ini?”

Ana: “Pertanyaan ini, waria atautkah laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan? Jadi kalau waria, itu kan ada kelainan ya, jadi kita akan jelaskan bahwa pada dasarnya manusia ada 2 jenis laki-laki dan perempuan. Tetapi karena ada perkembangan ketika di dalam kehamilan itu bisa jadi dia itu perempuan tetapi kemudian punya penis, itu ada kelainan atau sakit. Itu dia bisa paham oleh karena itu, anak-anak jangan kemudian menghina teman-teman waria yang punya 2 jenis kelamin itu. Itu kita ajarkan untuk menghormati.”

Penyiar: “Tapi sebenarnya waria itu kan laki-laki?”

Ana: “Ya bisa juga itu yang laki-laki kita katakan trans-gender. Dia sebenarnya laki-laki berpenampilan perempuan tapi kalau dilihat penisnya, penis betul bukan ada 2. Tapi ada juga orang yang mempunyai vagina tapi kemudian ada penisnya. Demikian juga, dia punya penis tapi juga punya semacam vagina. Jadi kalau laki-laki berpenampilan sebagai perempuan itu beda lagi. Kita katakan bahwa laki-laki yang membedakan dengan perempuan adalah alat reproduksinya. Bahwasanya dia akan berperan sebagai perempuan, misalnya memakai baju perempuan, memakai anting. Nah yang mengatakan itu anting itu perempuan, baju itu perempuan, celana panjang itu laki-laki, rok itu perempuan, itu adalah kita. Sebenarnya laki-laki dan perempuan bisa memakai itu semua. Tetapi kemudian kita serahkan saja pada anak kita untuk memilih. Jadi apakah dia akan memilih atribut yang kita sebut laki-laki atau memakai atribut perempuan. Tetapi bahwa fungsi reproduksinya tetap sebagai laki-laki dan perempuan. Dia tidak bisa melakukan fungsi reproduksi perempuan walaupun dia memakai atribut perempuan.”

Sumber: Transkrip program LIPSTIK “Kekerasan Seksual pada Anak-anak Perempuan”, edisi 28 Juli 2005, Lampiran 4.

Melalui pemberian informasi edukatif kepada pendengar seperti di atas, Radio Kosmonita turut memberikan tambahan pengetahuan baru pada perempuan dalam upaya mendukung pemberdayaan terhadap kaum perempuan.

Upaya pemberdayaan perempuan dilakukan pula oleh Radio Kosmonita dalam bentuk memberikan kepada pendengarnya suatu pemahaman dan kesadaran hak dan tanggung jawab sebagai perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah seperti terlihat dalam LIPSTIK edisi 27 Oktober 2005 dengan topik ‘Poligami dalam Konteks Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak’. Pada edisi ini, perempuan diberi suatu pemahaman dan penyadaran akan hakekatnya sebagai manusia yang setara dengan laki-laki, sehingga tidak boleh didiskriminasi dengan praktik poligami. Oleh sebab itu, dalam edisi ini, nara sumber yang dihadirkan, yaitu Tanti Supriatsih (pengacara dari Savy Amira) menghimbau para perempuan untuk mengatakan ‘tidak’ pada poligami.

Tanti Supriatsih: “Artinya kitapun seharusnya mengatakan tidak untuk poligami karena itu merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.”

Penyiar: “Ya baik mbak Tanti mungkin ada yang ingin disampaikan lagi buat para Kosmonita menyangkut hal yang kita bicarakan di sore hari ini? Mungkin seputar poligami gitu.”

Tanti Supriatsih: “Ya, berbagi cerita saja bagi para perempuan. Saya pikir katakan tidak untuk ketika pasangan Anda itu menduakan Anda karena itu sangat menyakitkan. Itu aja.”

Penyiar: “Apa lagi kalau alasannya nggak jelas ya.”

Tanti Supriatsih: “Dan sadari bahwa itu adalah kekerasan terhadap Anda.”

Sumber: Transkrip program LIPSTIK “Poligami dalam Konteks Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”, edisi 27 Oktober 2005, Lampiran 2.

Oleh karena perempuan memiliki hakekat sebagai manusia yang setara dengan laki-laki, Radio Kosmonita pun memberikan suatu penyadaran kepada perempuan bahwa perempuan harus mampu bangkit dari keterpurukan, tegar dan menjadi kuat jika menghadapi poligami.

Penyiar: “Mbak Endang setelah perceraian, apa yang dilakukan mbak Endang untuk kembali bangkit untuk proses penyembuhannya? Apa sempat ada trauma dengan yang namanya laki-laki?”

Endang: “Pada saat itu sempet benci, jengkel, terus kepikiran untuk nggak mau nikah. Terus saya menyibukkan diri, aku sering ke Savi Amira, bantu-bantu sambil baca-baca biar kita lebih banyak ngerti pengetahuan. Jadi pandanganku sekarang beda jauh.”

Penyiar: “Ya, dan mbak Tanti apa yang harus dilakukan oleh korban poligami ini?”

Tanti Supriatsih: “Saya pikir sama dengan yang dilakukan mbak Endang, lebih banyak berkumpul dengan teman-teman yang nantinya membawa efek yang lebih baik buat mbak Endang secara psikologis, kan masa depan masih panjang. Jangan akhirnya kita terjebak dalam situasi sakit, masa depan masih panjang. Juga banyak membaca, menyibukkan diri, jadi tidak banyak melamun, bergaul. Ini klise ya tapi cukup membantu.”

Sumber: Transkrip program LIPSTIK “Poligami dalam Konteks Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”, edisi 27 Oktober 2005, Lampiran 2.

Contoh lain dari usaha Radio Kosmonita dalam memberikan pemahaman dan kesadaran kepada pendengarnya akan hak dan tanggung jawab sebagai perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, secara tematik tergambar dalam LIPSTIK edisi 20 Oktober 2005. Pada edisi ini, Radio Kosmonita memberikan pengertian dan penyadaran kepada kaum perempuan, bahwa sebagai sesama kaum perempuan yang banyak mengalami diskriminasi gender dan juga sebagai anggota dalam kehidupan bermasyarakat, kaum perempuan harus saling mendukung dan membantu untuk keluar dari diskriminasi gender.

Penelepon: “Sejauh ini apa yang sudah dilakukan ibu Josepha dan kelompoknya untuk menuntut hak mereka sebagai perempuan di sana? Mereka itu kan menyayangkan sikap pendatang di sana, kenapa mereka nggak memperjuangkan kesempatannya misalnya dengan mendonkrak bahwa budaya yang mereka miliki nggak bagus kayaknya. Nggak mendukung sekali dengan apa yang mereka mau perjuangkan untuk mendapatkan kesempatan seperti itu. Jangan-jangan mereka nggak kenal sama Ibu Kartini ya”

Astrid Wiratna: “Kalau kita mempersepsikan dari kacamata kita di Jawa, kita bisa heran-heran ya, tapi kalau kita ada di sana, lihat kayak yang diperjuangkan Mama Josepha, untuk persepsi sebagai perempuan Papua yang pada umumnya takut suami, nggak berani menyuarkan haknya, Mama Josepha ini sudah bagus sekali. Dia punya kelompok perempuan yang kemudian ‘berani’ memperjuangkan hak dalam arti kata gini, akses mereka ke ekonomi kan relatif nggak ada, kan suami yang menentukan, nah kelompok Mama Josepha ini bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dijual di pasar dan mereka bisa punya uang sendiri yang kemudian mereka bisa belanja sendiri. Lalu mereka juga bisa ngomong tentang pendidikan anak. Jadi kalau misalnya suami nggak setuju, mereka bisa bilang: oh anak-anak kita musti sekolah. Karena mereka dekat dengan teman-teman LSM yang kemudian mengembangkan berbagai hal yang berkaitan sama kehidupan mereka sebagai ibu, kehidupan perempuan anggota masyarakat. Nah tapi kalau dibandingkan dengan seluruh masyarakat Papua, tentu aja mereka kayak setetes garam di tengah laut ya. Kan kecil banget, pulau Papua seberapa kali pulau Jawa, kan gitu ya. Jadi nggak kedengeran. Cuman untuk informasi aja, Mama Josepha ini udah pernah dapat sebuah hadiah seperti penghargaan kepada orang-orang yang

dianggap memperjuangkan perdamaian. Dan dia juga diakui di dunia internasional juga, dia pernah bicara di forum-forum internasional yang berkaitan dengan hak asasi masyarakat terasing. Nah tapi sekali lagi, bukannya nggak diperjuangkan, cuman nggak kelihatan. Dan kalau kita lihat orangnya, dia beda sekali dengan perempuan Papua pada umumnya. Istilahnya dia bisa bicara sama tinggi dengan orang asing sekalipun, meski dia nggak bisa bahasa Inggris. Nggak takut, bicara sama laki-laki, dia bisa ngomong, mengemukakan pendapat. Kebanyakan orang-orang Papua kan nggak bisa. Jadi bukan hanya dia aktivis perempuan, di Jayapura juga banyak tapi sekali lagi jumlahnya jika dibandingkan dengan seluruh orang Papua dan seluruh orang Indonesia, nggak ada artinya. Jadi gaungnya itu belum begitu kedengeran. Dan kalau kita lihat kebudayaannya, ya agak berat ya. Artinya tantangan mereka dibandingkan dengan teman-teman yang berjuang di Surabaya, Jakarta, mungkin jauh ya. Kita kan dukungannya banyak banget, kalau mereka yang dukung sapa? Jadi masih berjuang, kita doakan aja mudah-mudahan bisa mencapai hasil yang maksimal, pada konteks yang dia bisa.”

Sumber: Transkrip program LIPSTIK “Problem Diskriminasi Gender Kaum Perempuan di Papua”, edisi 20 Oktober 2005, Lampiran 1.

Dari penuturan di atas, secara analisa tematik tampak bahwa penelepon yang berpartisipasi merasa bahwa aktivis perempuan di Papua tidak bergerak untuk melakukan pembelaan terhadap kaumnya. Namun hal ini diklarifikasi oleh Astrid Wiratna, dengan menjelaskan bahwa sebenarnya sudah ada banyak hal yang diperbuat oleh para aktivis perempuan di Papua, namun semuanya itu masih kalah oleh budaya patriarki yang sangat dominan. Bahkan di akhir program, Astrid Wiratna menghimbau pendengar yang memiliki kesempatan diharapkan agar mau membantu kaum perempuan di Papua berjuang mewujudkan kesetaraan gender.

Astrid Wiratna: “Kalau saya sih harapannya temen-temen yang punya kelebihan untuk bisa sampai ke sana, mungkin kita bisa bantu para perempuan Papua untuk bisa keluar dari persepsi menurut adat. Mereka kan merasa bahwa mereka, ya udah beginilah mesti menurut adat. Diterima aja. Kita mungkin bantu mereka supaya mereka bisa lebih merdeka istilahnya. Lalu bisa mempertahankan harkat martabat yang seharusnya mereka bisa dapat, karena saya percaya kalau kesempatan diberikan maka mereka bisa juga sama dengan kita. Memang secara fisik mereka berbeda, cantik mereka lain dengan cantik kita, tapi menurut saya sebagai manusia kita semua punya hak yang sama. Bisa berdiri dalam hidup merdeka, bebas, hak diakui, bisa menyampaikan pendapat kemudian punya hak buat sekolah tinggi, dan sebagainya kan. Menurut saya, harapan saya sih akan ada teman-teman perempuan yang punya kelebihan waktu mungkin, tenaga dan energi dan sebagainya untuk pergi membantu mereka, sehingga percepatan pertumbuhan perkembangan yang sehat itu akan cepat dicapai.”

Sumber: Transkrip program LIPSTIK “Problem Diskriminasi Gender Kaum Perempuan di Papua”, edisi 20 Oktober 2005, Lampiran 1.

Dari penuturan di atas, secara skematik tampak bahwa dalam usaha pemberdayaan perempuan, Radio Kosmonita turut membekali pendengarnya dengan kecakapan sosial (*social skill*), yaitu kecakapan komunikasi dengan empati dan bekerja sama (Siman, 2006, p.99). Pendengar diajak untuk berempati terhadap kaum perempuan Papua dan bekerja sama untuk membantu kaum perempuan Papua keluar dari budaya patriarki yang selama ini mengekang seluruh aspek kehidupan mereka.

Upaya pemberdayaan perempuan yang secara skematik tampak dilakukan oleh Radio Kosmonita dalam program siaran LIPSTIK adalah juga dengan memberikan berbagai informasi antisipatif dan meningkatkan kewaspadaan perempuan terhadap berbagai praktik diskriminasi gender. Pada edisi 15 Februari 2006 LIPSTIK membahas topik ‘*Trafficking* dan Anak yang Dilacurkan’, dan di sini tergambar upaya Radio Kosmonita untuk meningkatkan kewaspadaan pendengarnya terhadap praktik pelacuran anak dan *trafficking*.

Penyiar: “Trus ada nggak mbak, kiat-kiat khusus biar nggak terjadi *trafficking*? Mas Yoris mungkin?”

Yoris: “Pertama sekali, kepada yang mau ke luar negeri misalnya harus dilengkapi dokumen yang selengkap-lengkapnyanya. Ke dua, pastikan bahwa di sana mereka benar-benar diterima untuk bekerja di sebuah perusahaan, artinya harus masuk secara legal. Jangan yang nembak ini itu, biasanya itu bohong belaka. Kemudian iming-iming yang besar, itu lebih pada penipuan.”

Penyiar: “Jadi kalau ada iming-iming yang besar kita harus waspada ya.”

Farahita: “Iya..mungkin kalau saya ya..lebih cenderung kepada persoalan perlindungannya, jadi yang dibutuhkan oleh anak ini. Peran serta orang tua tentunya juga dibutuhkan dalam memberikan kebutuhan anak, perlindungan. Karena memang sampai saat ini persoalan perlindungan terhadap anak, terutama anak-anak yang AYLA ini, banyak yang kemudian melihatnya hanya sebagai persoalan moralitas. Jadi ada tindakan-tindakan bahwa yang namanya anak yang dilacurkan ini kriminal. Sebenarnya yang mereka butuhkan adalah perlindungan dari persoalan-persoalan eksploitasi, ancaman, kekerasan yang harusnya diberikan menyeluruh oleh segala lapisan baik itu masyarakat, kemudian negara, dan juga komunitas kita.”

Sumber: Transkrip program LIPSTIK “*Trafficking* dan Anak-anak yang Dilacurkan”, edisi 15 Februari 2006, Lampiran 3.

Bahkan di akhir acara, Yoris menambahkan agar pendengar waspada terhadap media yang seringkali malah menstimuli audiensnya untuk mendapatkan

sesuatu yang lebih, tanpa disadari bahwa hal tersebut berpotensi untuk menyeret masyarakat terjerumus ke dalam praktik pelacuran anak dan *trafficking*.

Yoris: “Pertama sekali, kalau saya, kita perlu menumbuhkan kewaspadaan secara bersama baik orang tua maupun anak, bahwa sampai saat ini media-media yang ada kadangkala cenderung membuat orang supaya berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Misalnya orang hitam seperti saya ini dianggap jelek. Jadi orang harus berlomba-lomba untuk menjadi putih, menjadi bersih. Itu yang membuat orang-orang menjadi terjerumus sendiri. Mencari uang walaupun tidak punya kemampuan atau ketrampilan, tapi dia paksakan diri. Jadilah mereka jadi TKW atau apa dan lain sebagainya.”

Sumber: Transkrip program LIPSTIK “*Trafficking* dan Anak-anak yang Dilacurkan”, edisi 15 Februari 2006, Lampiran 3.

Melalui pemberian informasi antisipatif seperti di atas, maka pendengar akan lebih berhati-hati dalam menerima informasi melalui media. Dengan begitu pula akan memperkecil potensi terjadinya praktik pelacuran anak dan *trafficking* yang dikatakan Yoris adalah stimuli dari media. Dengan demikian maka Radio Kosmonita turut mendukung pemberdayaan terhadap perempuan dalam upaya perwujudan kesetaraan gender.

Peningkatan kewaspadaan terhadap diskriminasi gender nampak juga dalam program LIPSTIK edisi 28 Juli 2005, dengan topik ‘Kekerasan Seksual pada Anak-anak Perempuan’. Pada edisi ini, secara analisa skematik, Radio Kosmonita tampak memperingatkan pendengarnya untuk selalu waspada terhadap rentannya kekerasan seksual terhadap anak perempuan, yang mana justru banyak dilakukan oleh keluarga sendiri atau orang-orang terdekat.

Penyiar: “Jadi Para Kosmonita, kita sebagai orang tua tidak boleh menganggap aman orang-orang yang berada di sekeliling anak-anak, seperti guru, tetangga yang mungkin dianggap orang tidak mungkin melakukannya. Sudah amanlah istilahnya. Tapi justru karena kita lengah itu terjadi perkosaan.”

Umi: “Ya, jangan selalu dikira bahwa rumah itu tempat yang aman untuk anak-anak. Kadang-kadang menjadi tidak aman karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya rumah yang tadinya tempat paling aman menjadi tempat yang tidak aman lagi.”

Sumber: Transkrip program LIPSTIK “Kekerasan Seksual pada Anak-anak Perempuan”, edisi 28 Juli 2005, Lampiran 4.

Tidak hanya itu saja, Ana, nara sumber yang dihadirkan juga memberikan beberapa usaha untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan seksual pada anak-anak perempuan.

Penelepon: “Seperti yang kita tahu kekerasan seksual pada anak perempuan, semakin tahun semakin meningkat ya. Yang jadi ironisnya itu, yang banyak melakukan adalah orang-orang dekat, dan sebagai seorang ibu saya juga ada rasa takut. Kira-kira mungkin ibu bisa kasih petunjuk bagaimana cara mengantisipasinya?”

Ana: “Kekerasan seksual meningkat ya, dan yang mengejutkan kita, itu ternyata dilakukan oleh orang-orang terdekat. Itu masalahnya. Nah mungkin yang bisa kita lakukan untuk pencegahan terhadap hal ini, itu memang bu Yuni sendiri sudah punya pemikiran terhadap sex education. Nah menurut saya itu adalah salah satu langkah yang penting untuk mencegah kekerasan seksual pada anak perempuan. Kemudian yang ke dua adalah melakukan satu penyadaran pada masyarakat tentang posisi kita sebagai perempuan di dalam masyarakat itu bagaimana. Maksudnya, selama ini yang kita pahami adalah posisi perempuan itu selalu dalam posisi rendah dan fungsi reproduksi kita melekat pada peran-peran yang dianggap rendah, kemudian dilekatkan pada objektivasi bahwa perempuan itu adalah objek seksual. Posisi itu yang harus kita tanamkan pada anak-anak bahwa posisi itu tidak benar. Bahwa kita, perempuan dan laki-laki mempunyai fungsi yang berbeda, iya. Tapi tidak kemudian satu sama lain itu kemudian saling menjatuhkan. Kita perlu mengikis pandangan kita perempuan sebagai objek seksual. Kemudian yang ke tiga adalah melakukan pendidikan bagi anak-anak untuk asertif atau penolakan kalau terjadi serangan atas dirinya. Kenapa gitu? Karena anak-anak itu diposisikan sebagai orang atau individu yang harus menurut orang tua, harus menurut orang dewasa. Nah, itu kemudian mematikan sikap asertif anak untuk menolak. Demikian juga kalau ada serangan seksual atas tubuhnya, dia kemudian tidak berani untuk melakukan penolakan. Ya, ada 3 hal itu. Kemudian untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, menurut saya berikan seks education sedini mungkin. Bahkan mungkin sejak di dalam perut”

Sumber: Transkrip program LIPSTIK “Kekerasan Seksual pada Anak-anak Perempuan”, edisi 28 Juli 2005, Lampiran 4.

Dengan berusaha mengingatkan kewaspadaan pendengarnya akan berbagai potensi praktik diskriminasi gender, tentunya Radio Kosmonita berharap agar perempuan dapat dengan lebih mandiri melakukan pencegahan dan melindungi diri dari praktik-praktik diskriminasi gender.

Dari berbagai upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Radio Kosmonita, radio dengan segmentasi perempuan ini berusaha menjadi media massa yang berperspektif gender, yang turut mendukung perwujudan konsep kesetaraan gender. Radio Kosmonita mengedukasi pendengarnya dengan memberikan berbagai informasi yang informatif, edukatif dan antisipatif. Radio

Kosmonita membekali pendengarnya dengan kecakapan berpikir rasional (*Thinking skill*) dan kecakapan sosial (*Social skill*). Dengan pembekalan tersebut tentunya diharapkan pendengar Radio Kosmonita, yang mayoritas adalah perempuan, mampu menggali, menemukan dan mengelola informasi, mengambil keputusan dan memecahkan masalah secara kreatif, serta menjadi pribadi yang mampu berkomunikasi dengan empati dan kerja sama (Siman, 2006, p.99). Dengan edukasi yang diberikan, Radio Kosmonita tidak menempatkan perempuan sebagai objek namun berperan aktif sebagai subjek. Radio Kosmonita menempatkan perempuan sebagai subjek yang berpengetahuan, memiliki kemampuan dan keterampilan. Dengan edukasi yang diberikan, tentunya juga diharapkan perempuan tidak lagi ditempatkan dalam posisi yang lemah, melainkan mampu untuk berperan aktif sebagai subjek dalam ranah publik.

Selain itu, Radio Kosmonita juga berusaha mewujudkan kesetaraan gender bagi perempuan dengan berusaha melakukan perubahan paradigma, berkaitan dengan pencitraan perempuan yang selama ini dipakai (Siregar, 2002, p.219). Selama ini, potret diri perempuan dalam media massa, dalam literatur, surat kabar/majalah, film, televisi, iklan dan buku-buku masih memperlihatkan stereotip yang merugikan (Ibrahim, 1998, p.107). Dengan pemberian berbagai informasi yang informatif, edukatif dan antisipatif serta peningkatan kewaspadaan terhadap praktik diskriminasi gender, tentunya diharapkan perempuan dapat menjadi pribadi yang mandiri dan pada akhirnya media massa tidak lagi menampilkan perempuan dalam sosok yang pasif, tidak mandiri, tergantung pada pria, tidak berani mengambil keputusan dan yang terutama melihat dirinya sebagai simbol seks.

1.6 Kesetaraan Gender Versi Radio Kosmonita

Dari berbagai penjabaran konsep kesetaraan gender dalam program LIPSTIK pada penelitian ini dapat dilihat bahwa Radio Kosmonita berusaha mewujudkan kesetaraan gender melalui penyediaan ruang publik bagi kaum perempuan dan juga pemberdayaan perempuan dalam upaya mendukung kesetaraan gender.

Ruang publik yang disediakan Radio Kosmonita telah banyak menyuarakan kepentingan kaum perempuan, melalui penggambaran berbagai diskriminasi gender terhadap kaum perempuan, kritik terhadap pemerintah dan juga terhadap praktik budaya patriarki dalam masyarakat, seperti pengontrolan daya produktif dan reproduktif perempuan, seksualitas, gerak perempuan, harta milik dan sumber daya lainnya. Namun apa yang dikatakan oleh Radio Kosmonita sebagai ruang publik ini masih penuh dengan suara perempuan. Ruang publik Radio Kosmonita perlu disempurnakan lagi menjadi ruang publik yang lebih demokratis bagi perempuan itu sendiri dan juga bagi elemen-elemen masyarakat lainnya.

Pemberdayaan perempuan dalam upaya mendukung kesetaraan gender diwujudkan dalam pemberian berbagai informasi yang informatif, edukatif dan antisipatif. Radio Kosmonita berusaha memberikan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kaum perempuan tentang hak dan tanggung jawab sebagai perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, Radio Kosmonita juga berusaha untuk memberikan kemampuan dan berbagai ketrampilan hidup bagi perempuan untuk dapat hidup mandiri, sehingga perempuan mampu mengatur hidupnya sendiri, menentukan agendanya sendiri, menambah keterampilannya, meningkatkan kepercayaan dirinya, memecahkan masalahnya dan membangun kemandiriannya.